



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: V
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 5 Juni 2023
Waktu	: Pukul 13.07 WIB s.d.16.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (F- Nasdem/ Ketua Komisi VII DPR RI).
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara	: 1. Pembahasan Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN Tahun 2024 2. Pengantar RKA/K-L TA. 2024 3. Dan lain-lain.
Hadir	: 25 orang anggota hadir dari 50 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/ Ketua KOomisi VII DPR RI
2. Dony Maryadi Oekon/F-PDIP/Wakil Ketua KOomisi VII DPR RI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
4. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

5 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
3. Mercy Chriesty Barends, S.T.
4. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
5. Bambang DH

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M.
2. Drs. Mukhtarudin.
3. Bambang Hermanto, S.E.
4. Dyah Roro Esti Widya Putri, BA, M.Sc.
5. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Moreno Soeprapto
2. Dr. Ramson Siagian.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang anggota dari 4 anggota:

1. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Syaikhul Islam, Lc. M.Sosio.
2. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
3. H. Marwan Ja'afar.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
3. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, MI Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Arifin Tasrif (Menteri ESDM RI)
2. Dadan Kusdiana (Dirjen EBTKE/Plt. Sekjen Kementerian ESDM RI)
3. Nanang A. Manaf (Wakil Kepala SKK Migas)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, mari kita mulai Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, mohon maaf ini ada waktu sebentar karena banyak hal yang perlu disinkronisasi, tapi *inshaa* Allah semuanya adalah demi akurasi dalam perumusan asumsi makro dalam APBN yang terus-menerus kita gali dengan berbagai variabel-variabel yang sekarang muncul, yang kadang-kadang variabel yang menjadi dominan melihat tren berbagai masalah yang ada.

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera kami sampaikan,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI, akan segera bergabung nanti ada Pak Maman, ada Pak Bambang Haryadi,
Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, ini hadir *Inshaa* Allah lengkap,
Yang kami hormati Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia beserta jajarannya, serta
Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita semuanya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dikaruniai nikmat sehat sehingga kita dapat menyelenggarakan rapat pada hari ini dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing sebagaimana konstitusi mengamanahkan.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal Rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, maka pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran, dengan agenda:



1. Pembahasan Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN Tahun Anggaran 2024, dan juga
2. Pengantar Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga di tahun 2024.

Bapak-Ibu sekalian.

Berdasarkan data sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 21 anggota dari 8 fraksi, dengan demikian sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1), kuorum telah dinyatakan terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup.

Oleh karena itu Pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat kerja ini dilaksanakan sesuai ketentuan dan bersifat terbuka, apakah disetujui Bapak-Ibu sekalian?

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka terbuka, maaf terbuka atau tertutup, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.07 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu sekalian.

Sebelum melanjutkan rapat ini kita minta persetujuan Bapak-Ibu sekalian, bahwa rapat ini selesai pada pukul kurang lebih nanti pukul 15.00 WIB atau 2 jam sejak dimulai rapat ini dan apabila dinyatakan perlu maka bisa diperpanjang, setuju Bapak-Ibu sekalian?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Bahwa kebijakan sektor ESDM, baik itu dari asumsi dasar serta dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2023 harus dapat mendorong perekonomian lebih cepat, serta berpihak kepada rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut Komisi VII DPR RI telah membentuk Panja Asumsi Dasar Sektor ESDM, Panja Asumsi Dasar Sektor ESDM dibentuk oleh Komisi VII DPR RI dalam rangka mendalami dan menyiapkan usulan asumsi dasar sektor energi sumber daya mineral atau ESDM yang sesuai dan dapat dicapai dalam pembangunan perekonomian Indonesia di tahun 2024, khususnya pada sektor ESDM.



Panja telah melakukan pendalaman dengan berbagai pihak termasuk dengan Eselon I Kementerian ESDM Republik Indonesia, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, K3S dan Asosiasi-asosiasi Migas yang terkait.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Untuk efektifnya waktu pimpinan meminta persetujuan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI agar kita tuntaskan agenda pertama, yaitu pembahasan asumsi dasar sektor ESDM di tahun 2024. Setelah itu baru kita masuk ke dalam agenda pengantar rencana kerja anggaran kementerian/lembaga untuk tahun 2024, apakah disetujui Bapak-Ibu sekalian?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Kami persilakan Saudara Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya terkait asumsi dasar sektor ESDM dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Dipersilakan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang kami hormati Bapak-bapak Pimpinan beserta Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, serta para hadirin yang hadir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII pada siang hari ini.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi yaitu rapat kerja dengan agenda:

1. Pembahasan asumsi dasar sektor ESDM tahun 2024, dan
2. Pengantar untuk RKAKL tahun 2024.

Kami sampaikan asumsi dasar sektor ESDM untuk RAPBN tahun 2024.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang terhormat.

Secara ringkas dapat kami jelaskan, kami sampaikan asumsi dasar sektor ESDM sebagai berikut, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) Kementerian ESDM mengusulkan asumsi ICP dalam RAPBN tahun anggaran 2024 ada pada kisaran antara 70 dolar sampai dengan 80 dolar per barel.



Hal ini didasari atas realisasi rata-rata ICP sampai dengan Mei 2023 sebesar 76,41 per barel dan cenderung turun, serta berdasarkan proyeksi dari *Polling Reuters* dan *Short Term Energy Outlook* dari *United State Energy Information Administration Department of Energy*, harga minyak dunia tahun 2024 diperkirakan ada pada kisaran antara 69,47 dolar sampai dengan 88 dolar per barel.

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi harga minyak seperti pertumbuhan ekonomi global yang melambat, dengan inflasi yang tinggi di beberapa negara, negara-negara OPEC Plus yang akan melakukan kontrol pasokan minyak untuk menjaga harga di kisaran 80 dolar per barel, pertumbuhan produksi minyak mentah di Amerika Serikat, krisis geopolitik Rusia dan Ukraina yang masih terus berkepanjangan yang mengurangi ekspor minyak Rusia, serta adanya surplus pasokan minyak semester I di 2023 berubah menjadi defisit di semester II 2023 dan pembukaan kembali perbatasan di Cina.

Kedua, *lifting* minyak dan gas bumi mencermati realisasi sampai dengan bulan Mei tahun 2023 dan *outlook* 2023 *lifting* minyak dan gas bumi pada RAPBN tahun 2024 diusulkan sebesar 1000, 1,578 juta barel sampai dengan 1,7 juta barel setara minyak per hari dengan rincian minyak sebagai berikut:

- a. *Lifting* minyak bumi sebesar 597 sampai 625 ribu barel per hari,
- b. *Lifting* gas bumi sebesar 999 sampai dengan 1.054 ribu barel setara minyak per hari,
- c. Potensi tambahan produksi minyak bumi tahun 2024 antara lain, **...(suara tidak jelas 09.20)...** dari lapangan Flores, kemudian kita harapkan juga kondensat dari Tangguh, kemudian juga kita harapkan adanya optimasi pengembangan lapangan-lapangan di PHKT Kalimantan Timur serta OPL Sanga-sanga, serta OPL PHKT proyek ABF Niru Belimbing, kemudian proyek sofa dan **...(suara tidak jelas 09.41)**

Adapun potensi tambahan produksi gas bumi di tahun 2024, antara lain dari Tangguh Train 3 sebesar 200 milion sscfd, OPL Sanga-sanga 75 milion sscfd, proyek dayung facility 13 mm, proyek optimasi fasilitas produksi anoa 14 mm dan POD sentra Sanggang 20 mmscfd.

Terkait dengan *cost recovery* kami sampaikan bahwa realisasi *cost recovery* hingga Mei 2023 sebesar 2,5 miliar US dolar atau 30% dari target APBN sebesar 8,25 miliar. Sedangkan *outlook* di tahun 2023 itu adalah sebesar 8,25 miliar dan pada RAPBN 2023 *cost recovery* yang kami usulkan ada di antara 8 sampai dengan 8,2 miliar US dolar.

Kemudian mengenai BBM dan LPG subsidi, kami sampaikan volume BBM subsidi antara lain, diusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebesar 18,73 sampai 18,76 juta kiloliter yang terdiri dari:

- Minyak tanah sebesar 0,573 sampai dengan 0,574 juta kiloliter, dan
- Minyak solar sebesar 18,16 sampai 18,18 juta kiloliter.



Volume minyak mentah sebesar 0,57 juta kiloliter didasari pada PDRB daerah, pengguna minyak tanah dan belum ada program untuk konversi minyak tanah ke LPG, sedang dalam persiapan dan adanya permintaan dari kepala daerah.

Adapun volume minyak solar sebesar 18,16 sampai dengan 18,18 juta kiloliter didasari asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 sampai 5,7% sesuai dengan siaran pers dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 20 Februari 2023.

Kebijakan volume BBM bersubsidi tahun 2024 yaitu melanjutkan pemberian subsidi tepat untuk minyak solar dan subsidi berupa selisih harga untuk minyak tanah disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan, serta disertai dengan *roadmap* registrasi konsumen pengguna untuk peningkatan efisiensi.

Selanjutnya adalah untuk memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar kementerian/lembaga dan dengan pemda maupun instansi yang terkait.

Untuk volume LPG 3 kg mencermati realisasi sampai dengan Bulan Mei Tahun 2023 dan *outlook* tahun 2023, kami mengusulkan volume LPG 3 kg dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sedekat 7,8 sampai dengan 7,9 juta metrik ton.

Hal ini didasari atas kebijakan transformasi subsidi LPG 3 kg pada tahun 2024, yaitu mengarah pada perubahan paradigma dan subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang dengan memanfaatkan data dan sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan data terpadu kesejahteraan sosial untuk menentukan kelompok penerima manfaat dan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg yang terus dilakukan dengan pelaksanaan pendaftaran menggunakan teknologi informasi yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023 dan pada tahun 2024 sudah dapat diterapkan.

Kemudian untuk subsidi tetap minyak solar sampai dengan Bulan Mei 2023 dengan subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000,- per liter besarnya kompensasi yang dialokasikan sampai dengan Bulan Mei tahun 2023 adalah Rp4.406 per liter, untuk ICP rata-rata sampai dengan Bulan Mei sebesar 76,41 US dolar per barel.

Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 kami mengusulkan subsidi tetap untuk minyak solar sebesar antara Rp1.000,- sampai dengan Rp2.000,- per liter. Hal ini diperlukan mengingat agar keekonomian minyak solar mencapai Rp11.000,- per liter, sedangkan harga jual eceran adalah sebesar Rp6.800,- per liter.

Minyak solar masih banyak digunakan untuk transportasi darat, laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro dan pelayanan



umum, sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual eceran minyak solar yang stabil.

Dalam rangka efisiensi dan agar subsidi minyak solar tepat sasaran diperlukan dukungan peningkatan peran dari BPH Migas, PT Pertamina maupun Pemda dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi melalui program digitalisasi dan/atau pengawasan di lapangan.

Kami sampaikan terkait dengan subsidi listrik, usulan subsidi listrik pada RAPBN tahun 2024 sebesar *range* 69,8 sampai dengan 74,85 triliun dengan asumsi ICP berkisar antara 70 sampai 80 dolar per barel dan nilai tukar Rupiah berkisar antara Rp14.700,- sampai dengan Rp15.300,- per US dolar.

Usulan kebijakan subsidi listrik tahun 2024 yaitu tepat sasaran diberikan hanya kepada golongan yang berhak, yaitu untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga yang miskin dan rentan, serta mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien.

Bapak Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Selanjutnya kami sampaikan pengantar RKAKL Tahun Anggaran 2024, sebelum kami menyampaikan pengantar RKAKL tahun 2000, tahun anggaran 2024, izinkan kami untuk menyampaikan capaian kinerja sector ESDM sampai dengan Mei 2023 antara lain sebagai berikut:

- Capaian PNBPN sebesar 32,9 triliun dari target sebesar 219,58 triliun,
- Anggaran belanja 21,15% dari pagu anggaran 6,55 triliun,
- Investasi realisasi 5,7 miliar dolar dari target 33,5 miliar US dolar,
- *Lifting* minyak bumi 605 milion barel oil per day dari target 660.000 barel oil per day,
- *Lifting* gas bumi 946.000 barel oil ekuivalen dari target 1.100 barel oil ekuivalen,
- Ratio elektrifikasi 99,67% dari target 100% kapasitas pembangkit EBT mencapai 12,6 gigawatt dan ini bertambah 53,6 megawatt dari target tambahan sebesar 368,5 megawatt,
- Produksi batubara tercapai 293,5 juta ton dari target 695 juta ton.

Selanjutnya penyerapan anggaran belanja Kementerian ESDM mencapai 21,15% dari pagu sampai dengan Desember diperkirakan nanti akan dicapai 98,66%. Masih terdapat blokir anggaran yang cukup besar pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, khususnya untuk kegiatan bantuan, bantuan alat masak listrik.

Direktorat Jenderal EBTKE untuk kegiatan PJUTS dan Badan Geologi untuk kegiatan persiapan pengeboran eksplorasi dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan blokir pada Direktorat Jenderal Migas untuk Konkrit nelayan dan petani telah dibuka pada tanggal 2 Juni yang lalu, blokir dan *automatic adjustment* akan dibuka agar kegiatan dapat dilaksanakan.



Dari 349 paket kegiatan strategis, 102 paket dilaksanakan dengan mekanisme tender dan 247 paket nontender sebanyak 227 paket telah berkontrak atau 65% yaitu 58 paket tender dan 169 paket nontender.

Kita akan terus mengupayakan agar seluruh kegiatan ini dapat diselesaikan pada waktunya. Kemudian 46,45% anggaran dialokasikan untuk kegiatan infrastruktur dan survei sumber daya alam, antara lain:

- Pipa Cirebon-Semarang tahap 1 Semarang-Batang,
- Konkit nelayan dan Konkit petani PJUTS,
- Kemudian alat penyalur daya listrik Apdal, PLTMH, PLTS terpadu dan bantuan pasang baru listrik dan insentif pengembangan konversi kendaraan listrik.

Kami tetap berkomitmen untuk segera menyelesaikan seluruh kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Kementerian ESDM mengusulkan anggaran tahun 2024 sebesar 15,8 triliun dan mendapatkan alokasi pagu indikatif tahun 2024 sebesar 6,78 triliun, yang bersumber dari:

1. Dana rupiah murni 3,45 triliun,
2. Penerimaan negara bukan pajak 2,86 triliun, dan
3. Badan Layanan Umum Rp457 miliar.

Pengalokasian pagu indikatif tahun 2024 dengan mempertimbangkan pemenuhan anggaran yang bersifat wajib, seperti gaji dan operasional kantor, PNBP dan BLU untuk unit dan kegiatan tertentu sesuai persetujuan Kementerian Keuangan dan alokasi anggaran fungsi pendidikan, dan kegiatan prioritas nasional sehingga distribusi pagu per unit organisasi adalah untuk pagu unit organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp545,8 miliar,
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp206 miliar,
- c. Ditjen Migas dan Gas Bumi sebesar 1,774 triliun,
- d. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar 360 miliar,
- e. Ditjen Mineral dan Batubara sebesar 1,24 triliun,
- f. Dewan Energi Nasional sama seperti tahun lalu,
- g. BPSDM SDM sebesar 565,22 miliar, termasuk anggaran fungsi pendidikan sebesar 119,45 miliar,
- h. Badan Geologi sebesar 1,265 triliun,
- i. BPH Migas sebesar 231 miliar,
- j. Ditjen EBTKE sebesar 414,5 miliar,
- k. BPMA sama seperti dengan anggaran tahun lalu.

Sebesar 34,5% atau 2,34 triliun pagu indikatif 2024 dialokasikan untuk pembangunan untuk penggunaan infrastruktur dan survei sumber daya alam, antara lain pipa Cisem tahap 2 Batang-Cirebon, Kandanghaur Timur, Konkit nelayan dan Konkit petani, BPPL bantuan pasang listrik baru, kemudian



PLTMH dan PLTM, PLTS terpadu, revitalisasi PLT EBT dan pengeboran sumur.

Pagu anggaran 2024 ini masih belum mengakomodir beberapa kegiatan prioritas sebesar Rp6,97 triliun, antara lain:

- Kekurangan pendanaan pembangunan pipa gas bumi Cisem tahap 2, untuk ruang Batang-Cirebon sampai dengan Kandanghaur,
- Pembangunan pipa gas bumi untuk Dumai sampai dengan Sei Mangkei,
- Konversi minyak tanah ke CNG,
- Jaringan transmisi untuk 500 Kv,
- Bantuan untuk program *clean cooking* rumah tangga,
- PJUTS, PLTS atap dan insentif BBM, konversi BBM ke motor listrik yang sudah dibahas dalam trilateral *meeting*, antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

Bapak-bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Demikian tadi penjelasan kami mengenai topik yang diagendakan pada hari ini, kami mengusulkan untuk penyampaian rinci RKAKL pagu indikatif tahun 2024 akan disampaikan dan dibahas pada rapat dengar pendapat dengan masing-masing Eselon 1. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Pimpinan untuk dilanjutkan pada sesi selanjutnya.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatillahi wabarakatuh.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Pak Menteri.

Saya mohon izin jadi supir tembak lagi Pak Menteri, tadi pimpinan pertama karena panggilan yang dipertuanagung jadi langsung *ngacir*, memang begitu Pak Menteri, kita sama siapa aja *nggak* takut Pak Menteri, tapi dipanggil sama Ketua Fraksi sama Ketua Umum langsung geser, iya sama yang terakhir biar berimbang viralnya kalau dipanggil rakyat *wah* kita langsung turun, kalau inikan ke atas Pak, kalau rakyat turun, pas.

Iya, terima kasih Pak Menteri atas pemaparannya dan presentasinya, secara prinsip apa yang disampaikan oleh Pak Menteri sudah bisa kita tangkap maksud dan tujuannya.

Pada kesempatan kali ini rapat kita membahas 2 agenda, yaitu: pembahasan asumsi makro dan pengantar RKAKL dan tambahannya satu lagi



dan lain-lain, jadi itu ada request tambahan Pak Menteri karena memang mengingat cukup banyaknya isu-isu yang sangat penting dan strategis.

Khusus untuk pembahasan RKAKL, saya pikir nanti kita hanya lebih kepada mendengar pemaparan dari Pak Menteri karena nanti *kan* masing-masing Dirjen Eselon 1 akan mempresentasikan lebih detail terkait RKAKL. Jadi saya berharap teman-teman Komisi VII kita tidak usah bahas agak detail yang RKAKL karena nanti *toh* akan dibahas dengan Eselon 1 lebih lanjut.

Nah namun memang saya berharap kita agak dalam terkait asumsi makro APBN, jadi seperti itu kurang lebih dan tambahan yang terakhir adalah dan lain-lain. Cuma kalau boleh saya mengatur biar enak yang dan lain-lainnya setelah beres asumsi makro, jadi kita tuntaskan dulu asumsi makronya.

Silakan dari teman-teman apakah ada respon, tanggapan dan lain sebagainya. Mohon dibuka dulu yang asumsi makro, tadi secara prosedural kita sudah mengadakan rapat panja dan rapat internal terkait asumsi makro. *Nah* ini kita udah mendengarkan penyampaian dari Kementerian ESDM terkait asumsi makro versi pemerintah, jadi silakan nanti kita bahas bersama.

Kita langsung konkret aja ya bisa *nggak* dibuatin list yang tadi itu. Saya bacakan kembali terkait usulan dari kementerian:

- ICP kurang lebih pakai *range* 70-80 US dolar per barel,
- Lifting Migas 1,5 sampai 1,7 juta barel ekuivalen, dimana di dalam lifting migas itu ada 2 yaitu minyak bumi dan gas bumi. Dimana minyak bumi kurang lebih 597.000 barel sampai 652.000 barel, lalu lifting gas 999.000 barel ekuivalen sampai 1,054 barel ekuivalen.
- *Cost recovery*-nya diantara *range* 8,5 sampai 8,6 miliar US dolar,
- Lalu terkait volume BBM dan LPG bersubsidi, di sini ada tiga komponen, ada dua komponen, tiga komponen. Minyak tanah, minyak solar dan volume LPG 3 kilo, di mana minyak tanahnya 0,5 juta sampai 0,574 juta kiloliter, lalu minyak solarnya 18,16 sampai 18,18 juta kiloliter, volume LPG 3 kilo dari 7,8 juta metrik ton sampai 7,9 juta metrik ton, lalu yang keempat adalah subsidi minyak dan tetap solar yaitu kurang lebih 1.000 sampai 2.000 rupiah per liter dan yang terakhir subsidi listriknya 69,8 triliun sampai 74,85 triliun.

Saya langsung masuk ya PDI silakan, ya ini saya mohon izin langsung saya mencoba untuk memoderasi, kami pimpinan mencoba untuk memoderasi hasil dari kesepakatan *general* tapi silakan aja nanti teman-teman untuk *me-review*-nya, iya ya tadi terakhir, ini yang rapat internal ya.

Jadi ini Pak Menteri, ini adalah hasil dari Rapat Internal Komisi VII, namun nanti prinsipnya kita bisa didiskusikan ulang karena berdasarkan perintah undang-undang itu pembahasan anggaran itu dibahas bersama-sama antara pemerintah dengan DPR.

Sekarang saya masuk ke ICP usulan dari pemerintah 70-80 USD per barel, usulan dari Komisi VII 75-80 US dolar Pak Menteri, ini gimana kira-kira.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Ceiling atasnya masuk sama sepakat, bawahnya 75, mau 75? Tapi kalau cantik 70 sebetulnya Pak.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi *oke* Pak Menteri ya? *Oke*, jadi untuk ICP 75 sampai 80.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Lifting migas, minyak dan minyak bumi itu yang partainya dihapus aja, yang partai hapus diganti kesepakatan, kesepakatan rapat internal, rapat kerja *sorry*, rapat internal mohon maaf iya 75 sampai 80.

Iya sekarang *lifting* minyak bumi usulan dari pemerintah 597 sampai 652, usulan dari Komisi VII 630 sampai 660. Tadi sempat ada pembicaraan di antara pimpinan dengan Pak Menteri, di angka 610 sampai 640.

Iya bagaimana, Bu?

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Iya, terima kasih, Pimpinan.

Yang pertama berkaitan dengan *lifting* minyak bumi ini Pak Menteri, betul kita melihat pada realisasi yang ada tetapi di sini dibutuhkan sebuah dorongan. Dorongan kebijakan berdasarkan pada masukan dari rapat dengar pendapat dengan berbagai macam elemen yang datang ke Komisi VII.

Adanya harapan-harapan keseriusan pemerintah juga untuk menaikkan *lifting* minyak bumi ini dan potensinya ada. Jadi keseriusan itu dibuktikan dengan meningkatnya target, kalau kemudian targetnya tambah turun terus *gitu* ya ini tidak ada dorongan, sementara kita menginginkan sesuatu yang semakin naik *gitu*.

Karenanya ketika tadi di kesepakatan rapat internal itu kita dorong sampai dengan 660, itu adalah salah satu upaya untuk menciptakan sebuah



kondisi *gitu* ya, dorongan secara kebijakan karena kalau dorongan secara kebijakan dalam bentuk target ini ada, ini akan kemudian diterjemahkan di dalam upaya-upaya *gitu*, di dalam langkah-langkah untuk mengejar kenaikan *lifting* tersebut.

Tapi kalau misalnya targetnya saja sudah diturunkan pasti ini akan berpengaruh kepada upaya yang akan dilakukan juga *gitu* karena biasanya kalau target, kita *nggak* bisa berprinsip udah targetnya segitu aja biar nanti kalau lebih kan bagus juga, *nggak* masalah kalau lebih, tapi itu tidak mendorong *gitu*.

Yang namanya target itu harus sesuatu yang serius tinggi *gitu* dan secara potensi dimungkinkan, dari hasil RDP dengan beberapa stakeholder di Komisi VII ini, itu sebetulnya ada harapan-harapan bahwa *lifting* migas ini, khususnya *lifting* minyak bumi ini bisa naik *gitu*.

Karenanya ini yang mendorong kami untuk menaikkan target pada batasan sampai dengan 660 ribu barel tadi *gitu*.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya terima kasih.

Dari PKS memang mengangkat narasi besar yaitu ada spirit optimisme sebetulnya, sebetulnya semangatnya di situ aja Pak Menteri.

Silakan selanjutnya dari yang lain, *nah* tadi memang udah sempat Bu kita panjang juga Bu memang kita berdebat di sini karena versi dari Komisi VII ini kita memang berharap ada spirit *lah*, ada optimisme serta ada langkah konkrit karena begini Pak Menteri, contoh kayak misalnya kita itu *kan* Komisi VII menganggap kalau kita mau mendorong peningkatan percepatan optimalisasi produksi *lifting* migas nasional kita, salah satu upayanya itu adalah mendorong percepatan realisasi pembahasan RUU Migas.

Nah sekarang ini *alhamdulillah* Komisi VII udah serius Pak Menteri, kita udah ketok *nih* Komisi VII Rancangan Undang-Undang Migas, sekarang udah masuk di harmonisasi di Baleg. Jadi kayaknya yang jadi pemerintah ini bukan ESDM tapi Komisi VII Pak Menteri, jadi kayaknya yang lebih serius itu yang greget-greget itu kayaknya Komisi VII. *Nah* mungkin ini sebagai bahan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Interupsi Pimpinan.



KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kritikan konsumtif aja buat Kementerian ESDM.
Gimana Bro Nasir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII,
Teman-teman Anggota Komisi VII,
Saudara Menteri dan seluruh jajaran.

Mungkin langsung saja, mungkin yang mengawasi K3S ini *kan* regulasinya di bawah SKK Pimpinan. *Nah* kalau *lifting* aja dia mendesak kita harus menyelesaikan terus hasil *lifting* nya *nggak* bisa didorong, untuk apa *cost recovery* kita setuju. *Nah* harusnya ini dijelaskan sama SKK dulu, Pak Menteri tolong diminta SKK menjelaskan apa kendalanya, kenapa *lifting*-nya tidak bisa naik *gitu loh*. Tadi Anda bilang Rokan ini akan mengeluarkan sebesar-besarnya untuk *crude*-nya, *nah* ditambah lagi beberapa K3S.

Nah menurut saya dana *cost recovery*-nya ini minta tambah lagi, apa potensi yang diuntungkan buat negara? Izin Pimpinan mungkin interaktif dengan Kepala SKK. Kepala SKK-nya mana ini? Izin.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi memang kenapa.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Sepeda ya, iya ini memang main sepeda artinya iya Pak Menteri, udah salah. Gini Pak Menteri, ini kesalahan pemerintah harusnya yang jadi Kepala SKK itu orang yang tahu tentang perminyakan, tentang pengeboran, ini *nggak* tukang sepeda dijadikan Kepala SKK, jadi diputar-putar barang ini terus.

Ini harusnya hadir disini Pak Menteri, ini *kan* untuk kepentingan bangsa ini. Kita memperjuangkan bagaimana regulasi *lifting* kita ini bisa didorong, *nah* dia aja *nggak* punya pengalaman, *nggak* punya pengetahuan tentang perminyakan *gitu*. Tolong dijelaskan Pak, apa pengaruh Bapak meminta *cost recovery* sebanyak itu, sementara *lifting*-nya turun.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si):

Iya sebelum Pak Nasir saya kira harus ditanya kenapa itu *nggak* datang Kepala SKK, menteri datang dia *nggak* datang, kelakuan itu namanya.



KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ada lagi Pak Karding? Memang sesama pembalap sepeda harus saling mengingatkan.

Selanjutnya Pak Mul.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri dan teman-teman sekalian.

Saya sedikit menambahkan logika dari Bu Diah ya, kenapa kita menginginkan angka 660. Kita tadi Pak Maman sudah menegaskan ingin membangun optimisme, terus terang selama saya jadi Anggota DPR RI Komisi VII yang terjadi adalah Komisi VII memaksakan angka kepada pemerintah dan pemerintah selalu *defense* dan juga *nggak* terlaksana, itu fakta.

Tapi SKK Migas mengatakan 1 juta barel, 1 juta barel, 1 juta barel 2030, kita buang *lah* kontradiktif seperti ini, harus serius kalau kita punya niat tolong dijalankan secara bertahap. Jadi hari ini *nih* sebenarnya pemerintah serius *nggak sih, kan* SKK Migas saja *nggak* ada, kita sendiri ingin membubarkan SKK Migas dengan RUU Migas kita ya. *Nah* ini dia, jadi memang harus segera *nih* Pak Maman *nih* undang-undang itu, biar normal *lah* kelembagaan permigasan kita ini sehingga betul-betul legalitas kokoh *gitu*.

Jadi itu Pimpinan, jadi ini menjadi kontradiktif apalagi nanti kalau kita minta *cost recovery*-nya naik, *nah* logikanya di mana lagi *lifting*-nya turun, *cost recovery* minta naik *kan* jadi aneh ini. Makanya Menteri Keuangan ngamuk *gitu kan* karena logikanya *nggak* masuk. Kita bantu lagi dengan logika *cost recovery* sebagian untuk eksplorasi *loh*, itu bersifat investasi *loh*, nambahkan logikan *kan* ini jadi dorong-dorong mobil mogok.

Mohon mendapat pertimbangan Pak Menteri, dalam logika bernegara kita termasuk target 1 juta barel itu. Kemarin kita FGD dengan Pertamina, Pertamina semangat, kami akan mengusulkan mengembangkan apa yang disebut nonkonvensional eksplorasi, *eh* eksploitasi dengan teknik-teknik apa, Shell apa *gitu, wah* semangat juga itu. Katanya Pertamina siap 1 juta barel di dalam wilayah tanggung jawab kami, *kan* sudah apa dominan sekarang, *lah* ini yang lebih jadi optimis lagi, mohon dapat dipertimbangkan kembali.

Demikian, terima kasih.



KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya Terima kasih. ...*suara tidak jelas (41.45)*... Jangan ke Menteri dulu ya, gimana? **Nangkap, nangkap** Pak Nasir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Interaktif dulu dengan SKK tadi.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, silakan Pak Nasir.

Silakan, nanti dulu ya Pak Menteri, Pak SKK bisa direspon kenapa.

WAKIL KEPALA SKK MIGAS (NANANG A. MANAF):

Iya izin Pak Menteri, Pimpinan dan Pak Nasir tadi yang sudah menyampaikan pertanyaannya.

Jadi terkait dengan *cost recovery* ya Pak ya, *cost recovery* yang kami usulkan ini kan di kisaran paling tinggi 825 8,25 miliar dolar. Itu dengan asumsi.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar-sebentar Pak, dijelasin dulu pertanyaan kenapa Kepala SKK-nya *nggak* hadir.

WAKIL KEPALA SKK MIGAS (NANANG A. MANAF):

Izin Pak, ya terkait dengan Pak Kepala SKK Migas memang hari ini berdinan Pak ke luar negeri ke Singapura, untuk urusan negosiasi masalah gas yang tentunya juga sangat signifikan ke depan karena itu bagian juga dari PNBK kita Pak.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Gas apa Pak, gas yang di mana Pak kayaknya penting kali itu, biar kita tahu juga.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Gas yang di mana Pak, ditanya Pimpinan.



WAKIL KEPALA SKK MIGAS (NANANG A. MANAF):

Yang di Singapura Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Gas dari mana.

WAKIL KEPALA SKK MIGAS (NANANG A. MANAF):

Yang ekspor ke Singapura.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Yang dari Natuna itu ya.

WAKIL KEPALA SKK MIGAS (NANANG A. MANAF):

Iya betul Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Runding bagi-bagi atau runding *quantity*?

WAKIL KEPALA SKK MIGAS (NANANG A. MANAF):

Untuk mendapatkan harga terbaik tentunya Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Nggak maksudnya harga terbaiknya gimana, itu *kan* kontraknya udah *long time* Pak mau apa lagi yang dibicarakan.

WAKIL KEPALA SKK MIGAS (NANANG A. MANAF):

Inikan akan selesai untuk yang fase sampai 2024 ini kan Pak, kemudian untuk selanjutnya kan kita harus bernegosiasi lagi berapa volumenya, berapa durasi ke depan, berapa harganya. Tentunya kan kita harus.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Mestinya 2024 itu habis kontraknya.

WAKIL KEPALA SKK MIGAS (NANANG A. MANAF):

Iya Pak.



F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Mungkin Pimpinan, ini juga menjadi tugas kita untuk melakukan pendalaman, apakah diperpanjang atau tidak nanti, *kan* bagus kita serahkan ke Pertamina aja *gitu*, jadi *nggak* usah dirunding lagi Pak, kalau harganya murah kali ngapain dirunding *kan*, percuma, takutnya runding-rundingan *gitu* barang ini.

Harusnya kalau sekali lagi waktu rapat-rapat gini seluruh stakeholder yang memegang pertanggungjawaban harus hadir, kalau *nggak* hadir *nggak* usah dikasih jabatan, percuma *gitu loh*. Dan saya tanya Pak, kenapa *cost recovery* diminta segini besar, apa potensi yang dihasilkan di sini.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar Pak Nasir, satu-persatu dulu *nih*, belum, belum.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Maksudnya *kan* kita mau menyetujui *lifting* ini.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Soal kedatangan dulu *kan*.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan, dari *cost recovery* ini *kan* kita tahu dorongan *lifting*-nya nanti bisa berapa *gitu loh*. Nah kalau *lifting*, kalau tadi seperti yang disampaikan sahabat kita dari PKS seperti Pertamina, kalau yang di Rokan itu *kan* dia sudah *nggak* pakai *cost recovery* Pak. Jadi beda lagi, padahal dia *crude*-nya paling besar. Yang saya tanya K3S mana yang mengajukan sebesar ini *gitu loh*, apa potensinya, saya minta penjelasannya dulu *gitu*.

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, sip.

Pak Bambang.



F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi rapat agenda hari ini salah satunya adalah penetapan ya asumsi makro sektor ESDM untuk kita kirim ke Badan Anggaran. Dan untuk diketahui bahwa kita sebelumnya sudah membentuk namanya Panja Asumsi Makro yang dipimpin juga Pak Maman ketuanya *kan*.

Nah untuk itu bahwa kami sudah banyak melakukan tahapan-tahapan, kami sudah rapat dengan SKK Migas, dengan K3S, dengan beberapa pakar dan kami juga sudah menetapkan kesepakatan di panja. Ini saya bacakan, jadi untuk *lifting* minyak kita di panja kita tetapkan angkanya adalah 630-650 sampai kisaran rentangnya 630-650, semua terekam dalam rapat dengar pendapat bersama, mungkin Pak Waka juga hadir *kan*, K3S juga hadir jadi saya pikir mungkin Pak Menteri, ada teman-teman yang waktu itu tidak masuk di panja *kan* jadi tidak mengetahui proses penetapan asumsi ini.

Nah tadi siang sebelum rapat kerja kita, kita juga melakukan rapat internal, rapat internal yang biru ini Pak bahkan di rapat internal kita sepakati 630-650, *eh* 660 *kan*, tapi tadi hasil kita sedikit diskusi dengan Pak Menteri dan beberapa teman-teman, ada keberatan dari Pak Menteri, bukan keberatan, tadi upaya yang rasional.

Jadi angka-angka tersebut kita revisi kembali, kita usulkan, kita diskusikan bersama karena kita juga *nggak* mau juga kita menetapkan angka yang terlalu tinggi, *ntar* capaiannya jauh dari apa yang kita tetapkan. Kita jangan sampai *ntar* publik menyangka bahwa kami menetapkan asal-asal, makanya Komisi VII dengan kesadaran kami karena ingin memperoleh masukan yang banyak, kami adakan namanya panja karena kami ingin menggali lebih dalam ke dalam penetapan asumsi ini.

Nah untuk itu saya pikir bahwa angka yang kita ingin capai adalah angka yang moderat, angka yang tidak jauh dari meleset karena APBN ini sistemnya *kan* kita perkiraan Pak, ini baru indikatif, *ntar* per-16 Agustus Presiden akan bacakan di situ akan juga akan ditetapkan pagu indikatif yang akan di, yang akan dipakai untuk perhitungan APBN 2024.

Jadi saya pikir kami berpandangan bahwa kami ingin menetapkan angka yang, angka sangat moderat tidak asal-asal dan juga memang benar-benar mampu dipertanggungjawabkan oleh Menteri ESDM.

Nah untuk itu saya berharap bahwa apa kita tidak ingin kembali ke belakang, Pak Dwi sudah kita bolak-balik panggil. Jadi kami tidak hanya rapat hari ini, sebelumnya kami udah rapat bolak-balik dengan Pak Dirjen Migas, dengan Pak SKK Migas, BPH Migas *kan*.

Untuk itu kami ingin angkanya angka yang sangat *equal* banget, jangan sampai kita tetapkan terdorong angka 630-660 tapi jauh meleset, tapi kita juga *nggak* mau angka terlalu rendah. Makanya tadi ada muncul angka batas bawahnya kita naikkan, *toh* juga ntar belum tentu juga dipakai batas atasnya juga, tapi batas atasnya juga *nggak* jauh-jauh.

Maka kami tadi mengusulkan termasuk fraksi saya mengusulkan tadi kita ingin di angka 610-640 seperti yang ditanggapi Pak Menteri, kami kalau angka batas bawahnya 610 Pak Menteri masih menyatakan menyanggupi.

Jadi saya pikir itu Pak Menteri, jadi saya berharap bahwa terkait persoalan Kepala SKK Migas udah selesai karena sebelumnya kami sudah gali bolak-balik *kan*, di panja bersama Pak Dirjen. Ini tinggal memfinalkan angka antara rentang bawah dan batas atasnya.

Mungkin itu dari kami, kami usulkan 610-640.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Langsung aja sekaligus sama yang gas tadi berapa?

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan, kita telah melalui rapat internal komisi *nah* telah dipaparkan di depan, sebaiknya menteri yang merespon, kita tidak usah merespon lagi untuk melakukan efisiensi waktu dan sebagainya. Kalau memang tidak ada kesesuaian baru kita lempar ke *floor*, itu usul kami Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, ditangkap Pak Nasril, karena usulannya luar biasa, bagus sekali.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan, sebentar.



Saya setuju yang disampaikan pimpinan tadi, tapi *kan cost recovery* di sini *kan* akan dibahas kemudian. Makanya saya tanya kalau *nggak, nggak* saya tanya *gitu loh* Pimpinan. Saya nanya ini karena itu tulisannya akan dibahas kemudian, saya tanya di situ, kalau *nggak kan nggak* saya tanya tadi, makanya saya tanya kenapa *cost recovery* banyak-banyak, hasil *lifting*-nya *nggak* sesuai, jelasin *dong*, di situ yang mau kita jelaskan, apa *sih kok* ini kosong ini, *kok* kita ngerumus ke *lifting gitu loh*.

Sementara *cost recovery* ini diminta gede-gede, kita uraikan dulu di situ *gitu loh*, ini uang rakyat, bukan uang kita, biar *clear gitu loh*. Makanya saya minta Kepala SKK-nya di sini, itu *kan* jelas belum kita bahas, tadi panja udah *oke*, rapat internal tadi saya juga bilang nanti kita lakukan pedalaman karena tadi saya baca itu, *gitu loh*, biar *clear* dijelaskan dulu baru kita rumuskan, sepakat *nggak gitu loh*.

Itu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Cocok itu, jadi sekarang kita masuk dulu, saya langsung moderasi aja yang *lifting* gas dan *lifting* minyak Bapak *respond* dulu Pak Menteri, nanti baru habis itu kita ketemu angka dari *lifting* minyak dan *lifting* gas baru kita berdebat panjang lebar 100 hari 1 malam masalah *cost recovery*.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Bukan, Pimpinan begini, ini *kan* ada sektor masing-masing, Pak Menteri inikan sebagai penanggung jawab, biarkan yang kita tanya tadi, sebentar tadi kita *kan* ada kelompok panja, ada yang *nggak* kelompok panja. *Nah* supaya *clear gitu*, inikan forumnya udah bersama, supaya mengangkat angka itu panja ini udah bener atau belum. Kalau ada teman-teman ngasih masukan *kan* masih bisa diubah keputusan ini.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya Pak Nasir tenang, masuk barang itu ke situ.

Maksudnya begini biarkan dulu direspon dulu sama Pak Menteri yang *lifting* minyak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Pak Menteri ini udah paham Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):



Oke, silakan Pak Menteri, direspon Pak Menteri itu terkait *lifting* minyak dan gas bumi usulan dari Komisi VII itu 630 sampai 660, yang gas itu 1,030 sampai 1,036 mohon direspon dulu sama Pak Menteri kira-kira, nanti baru habis itu kita masuk, kita bicara dulu baru habis itu kita masuk ke *cost recovery*.

Lanjut Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI.

Jadi mengenai *lifting* minyak ini kita sudah beberapa tahun kita melihat bahwa *tren* daripada *lifting* ini selalu menurun dan kendala-kendala di lapangan memang juga menunjukkan bahwa kualitas daripada minyak kita menurun. Sehingga memang dibutuhkan upaya dan *cost* yang besar untuk bisa memurnikannya. Ini adalah rasio antara air dan minyak udah sangat sangat tinggi sekali.

Dari sektor pemerintah kita sudah berupaya untuk mendorong, antara lain dengan memberikan insentif-insentif dan juga program-program masif *drilling* tapi hasilnya memang masih belum seperti yang kita harapkan karena fasilitas sumur-sumur kita yang ada ini sumur-sumur tua, belum ada sumur-sumur yang baru dan kecenderungannya memang *output*-nya menurun.

Memang ada program ke depan antara lain tadi *unconventional*, iya sudah ada kerjasama sama dengan salah satu perusahaan dari Amerika yang ahli dibidang itu. Dan ini memang membutuhkan waktu, mungkin 8-10 tahun lagi baru akan kelihatan, kalau sekarang ini negosiasinya berjalan cukup, cukup lancar.

Kemudian juga sumur yang bisa kita harapkan ini yang di Cepu, dia masih ada potensi klastik tapi itu juga dia baru akan dibor, baru akan dibor tahun ini dan tahun depan, *infill* akan ada tambahan 40 juta barel. Kemudian juga yang klastik ini baru akan dibor lagi untuk mengetahui, apakah potensinya masih sebesar sumur yang lama.

Jadi 2 ini yang memang menjadi harapan kita selain juga ada rencana kita untuk melelang 5 wilayah potensi baru migas, tapi memang kondisi geologi kita lebih banyak ditemukan potensi gasnya dibandingkan dengan minyaknya, kecuali yang ada di, potensi yang ada di, *tengarai* ada di Warin. Warin ini masuk dalam wilayah hutan lindung, itu yang bagaimana kita bisa mengupayakan.

Kalau gas memang ada tendensi kenaikan, makanya itu ada, ada di gas ini kita lebih optimis, adanya produksi Tangguh 3, kemudian juga adanya potensi di Andaman dan juga mulai kita harapkan juga nanti IDD dan Masela ini juga bisa diselesaikan dalam waktu yang dekat, tetapi itu nanti produksinya



baru akan, akan apa terjadi sekian tahun mendatang. Untuk itulah memang kondisinya yang harus kita jaga.

Jadi mungkin demikian, jadi insentif kita berikan, kita harapkan memang RUU Migas yang diinisiatif oleh Komisi VII RI ini akan memberikan penguatan, bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber potensi migas kita dalam masa transisi energi ini semaksimal mungkin.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Konkretnya tadi angkanya berapa Pak Menteri, yang diharapkan oleh Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Iya tadinya kami berpikir maksimum di 625, tapi kami sepakat tadi yang *range*-nya antara 610 sampai 640 dan kita akan *fight* di *bottom*, *bottom limit*-nya ini.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Untuk gasnya?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Gasnya itu sama seperti yang kita sepakati.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

1030-1036 iya *range*, artinya angka ini menurut Pak Menteri tergambaran cukup optimis. Namun untuk *lifting* gas kita naik di atas dari yang dicanangkan oleh pemerintah *gitu* ya? *Oke*.

Nah saya lempar dulu pada teman-teman, maksud saya begini habis kita putuskan 2 angka ini baru kita masuk masalah angka *cost recovery* *gitu loh*. Jadi *kan enak* kita, kita berdebat-debat *cost recovery* tapi kita *nggak* tahu berapa angka yang mau kita target *gitu*.

Saya lempar dulu kira-kira kalau angka ini gimana? Silakan.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Saya mau bertanya dulu sebelumnya Pimpinan, itu yang kolom hijau yang judulnya usulan Menteri ESDM 597 sampai 652 itu betul usulan Menteri ESDM dokumen resmi kah? Satu dulu pertanyaan saya itu dulu, iya Pak Menteri?



MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Ini tadi kita bahas.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Saya mau tanya angka itu dulu usulan ESDM atau bukan?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Bukan, jadi itu tadi masuk kita pernah bahas. Kita bahas, waktu itu kita arahkan ini paling bisa 625 untuk *ceiling* top-nya dan sekarang inikan kita bahas saya sampaikan mengapa kita berada pada angka tersebut.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Nggak maksudnya angkanya 625 atau 652?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Saya di 625.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi gini saya coba moderasi, angka optimisme kalau kita tidak pakai *range* ya yang di optimis, yang memang diinginkan oleh pemerintah itu 625, itu angka optimis kalau kita pakai satu angka. Namun makanya kita buat *range* dari 610 sampai 640 agar nanti pada saat pembahasan di Banggar itu memberikan ruang keleluasaan bagi teman-teman yang di sana.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Iya Pimpinan, maksud saya *kan* sebelumnya tercantum 597 ke 652. Pertanyaan saya itu berdasarkan dokumen apa, apakah itu betul dokumen dari Kementerian ESDM adalah sampai 652? Kalau itu dari dokumen ESDM sampai 652, makanya saya nanya dulu itu dari dokumen ESDM atau bukan.

Nggak maksudnya gini mohon maaf sebentar

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Izin Pimpinan, ini 2 kali dibolak-balik ini.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):



Ada Pimpinan Sidang, makanya kalau saya belum *oke* saya jalan terus tapi pasti saya kasih, satu-persatu dulu.

Bu Diah lanjut dulu, Bu Diah dulu.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Jadi saya cuma ingin memastikan, itu yang pertama *kan* tadi angkanya 652 bukan 625 di kolom hijau itu tadi 652 saya baca, *nah* itu apakah dokumen ESDM atau bukan, itu dulu saya ingin tahu itu dokumen ESDM atau bukan?

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Dokumennya saya sampaikan, dokumennya memang dari ESDM tapi ada *typo* yang tidak. Iya.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Typo.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Mohon maaf Pimpinan ya sekali lagi, kita mengambil pertimbangan berdasarkan informasi. Menurut saya *typo* seperti ini itu ajaib karena itu berdampak implikasinya besar *gitu*.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Iya, untuk itu maka tadi pagi kami koreksi, *nah* ini kami sepakati dengan *range* 610 sampai 640.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Udah tangkap, cukup Bu Diah masih ada lagi?

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Iya poin saya tetap Pimpinan, jadi bukan masalah apa ya bukan *point of view* dari sisi harapan saja *sih* sebetulnya Pak Menteri ya, tapi dorongan ini harus betul-betul sangat kuat karena ketika target itu turun ya kecenderungannya nanti ah targetnya juga *nggak* tinggi *kok gitu*. *Nah* ini kalau



kami berharap bahwa ini masih tetap bisa di apa namanya, ini bukan soal harapan tetapi ini adalah berkaitan dengan nanti akan mendorong, akan membuat semua stakeholder ini lebih dipaksa untuk berusaha melakukan, apakah dari sisi regulasinya, apa dari sisi teknologinya, apalagi apakah itu nanti misalnya di *cost recovery*-nya atau apapun, itu akan mendorong tergantung pada target yang ingin dicanangkan *gitu*. Jadi saya tetap berharap bahwa rapat ini tetap bisa menetapkan pada batas atas di 660.000.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, Pak Mul masih?

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Masih, kalau menurut saya Pimpinan di depan ada wartawan, saya baca dokumen semua termasuk asumsi makro. Jadi Pak Menteri sudah melakukan kebohongan publik kalau menyatakan ini *typo*. Ini saya baca dari Menteri Keuangan asumsi makro tertulis jelas, itu sebesar 597 sampai 652, dokumen dari Kementerian Keuangan kita baca, bahkan dikutip di sini angka 1 itu adalah KEMPPKF 2024. Kita bisa mengubah angka-angka itu sesuai kesepakatan kita, tapi *nggak* boleh kita menyatakan bahwa ini dokumen yang keliru atau *typo*. Ini data-datanya ada semua.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Boleh saya respon.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Nah ini, ini poin pentingnya, jadi memahami bahwa usulan dari kementerian, Kementerian Keuangan juga melalui kerangka makro ekonomi PPKF itu adalah angkanya seperti ini, iya 652. Memang *nggak* mencapai target *lifting* kita *kan gitu* kenyatannya, karenanya mari kita upayakan bagaimana yang terbaik, bukan dokumennya yang tiba-tiba jadi *typo*.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Pak Mul.



Jadi memang kita sudah menyadari bahwa sudah 3 tahun ini *kan* tidak pernah kita bisa mencapai dari 680, turun ke 650 tiap tahun itu ada 30.000 sampai 40.000 penurunan dan upaya-upaya untuk bisa mendorong lagi itu udah banyak diberikan, berupa kebijakan, insentif dan dorongan-dorongan lainnya. Jadi memang trennya itu menurun, selain karakter dari sumurnya juga peralatan-peralatan yang sering *shutdown*.

Jadi memang angka yang 652 ini kami sampaikan bahwa itu terlalu tinggi dan kita dari kementerian pada posisi di 625 sebagai poin, poin apa, poin maksimum target yang harus kita bisa capai, ini yang kita sampaikan. Jadi saya minta juga dikoreksi yang 652 itu, yang 652 menjadi 625 dan tadi telah kami sampaikan karena ini adalah forum untuk bisa dibahas antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM sebagaimana apa adanya yang memang kita hadapi.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oh jadi saya udah bisa nangkap Pak Menteri, artinya sebetulnya dari awal itu memang 597 sampai 652, itu dulu ya. *Nah* dalam proses perjalanan bahwa terjadi pembahasan rapat-rapat panja tadi antara Komisi VII dengan beberapa mitra-mitra terkait. *Nah* ketemu memang berdasarkan pandangan dari pemerintah optimisme angkanya adalah 625.000 barel *kan gitu*.

Namun karena kita memahami kondisi penentuan *lifting* minyak dan gas ini sangat *folefil* makanya kita tetap mengusulkan dalam *range*. *Range* angka itulah tadi yang diusulkan oleh pemerintah dan dalam forum ini mau diusulkan di 610 sampai 640, setuju *nggak* teman-teman?

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya silakan Mbak Mercy.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Ini catatan pertimbangan aja tanpa apa namanya, saya karena tidak ikut pembahasan dalam tanpa merubah ya. Pada saat kita pembahasan itu 2, 2 mata rantai pembahasan awal setuju di angka yang tadi disampaikan oleh pemerintah, kita waktu itu sepakat dengan batas atas 650, udah *clear*, kita turun 2 digit dari punyanya pemerintah, iya awalnya.

Kemudian kita konstataasi dengan *outlook* punya-nya pemerintah, *outlook* punya-nya pemerintah 621. Waktu itu masih rapat setengah kamar di



dalam ruangan pimpinan, kita minta untuk K3S yang 10 besar itu kan hadir dan waktu itu kemudian ada penjelasan tambahan, bahwa dari *project* Ande-Ande Lumut itu dapat tambahan kurang lebih 25.000 barel, betul ya? Waktu itu *kan* kita bahas di ruangan rapat terbatas.

Kemudian dari *Indonesian Water Development* kalau saya *nggak* salah ada tambahan mungkin diatas 10.000 sampai dengan 20.000 barel, saya *nggak* tahu ya kayak *gitu*. Makanya waktu itu kita cukup optimis untuk batas atasnya menjadi 650 dan waktu itu kan disepakati bersama semua dengan dirjen dan lain-lain.

Tadi di dalam rapat kita sudah bahas ada di angka 650, tetapi kemudian ketika sampai di *cost recovery* ada kemungkinan *cost recovery* naik, kita yang menuju ke Banggar agak kebingungan bagaimana mengkonstatasi ini kalau tidak menaikkan, *toh* ini kan proyeksi interval indikatif bukan harga mati, supaya juga bisa mengamankan *cost recovery* yang bakalan naik itu, tadi ceritanya demikian kira-kira.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya udah nangkap Mbak Mercy, terima kasih, cakap.

Jadi begini usulan konkret dari Mbak Mercy tadi Pak di angka 610 sampai 650 karena *toh* juga, ini usulan konkret ya. Saya mohon maaf *loh* saya minta ini biar kita satu step-satu step dan tertata, saya belum mau bahas *cost recovery* dulu. Kita tuntaskan dulu minyak dan gas, kita ngomong *cost recovery* kalau minyak dan gasnya belum ketok sampai bodoh pun kita *ndak* bisa, ribut nanti kita.

Jadi nanti dulu, sebentar dulu kalau, itu dulu Pak Menteri gimana?

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Nggak sebentar Pak Maman, sedikit saja kita luruskan angka yang ini.

Inikan angka internal tadi, rapat internal 630-660, datang Pak Bambang lagi 610-640, ini banyak sekali saya pun jadi bingung, Pak Maman, *nah* panja berapa? *Nah* sekarang yang mana yang mau kita pakai kalau *nggak* didudukkan dulu Pimpinan, ditanya lagi pemerintah tadi *kan*, jadi kalau nanti di lempar-lempar aja ke *floor*-nya ini *nggak* ketemu. *Nah* ini udah 3 barang ini dibawa ke sini.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan, terima kasih.



Jadi saya tetap minta kesimpulan dari Panja itu. Tadi kita menerima dan ikut memutuskan dengan berbagai macam pertimbangan, ini tidak hanya angka *odok-odok* itu, itu dengan pertimbangan, dengan berbagai pertimbangan dalam rapat internal dan rapat panja dan pemerintah itu harus dipaksa, dipaksa, kalau *nggak* mau dipaksa mundur dari eksekutif.

Jadi untuk itu masalah *lifting* ini sejak bertahun-tahun masih masalah karena ada *hidden* didalamnya. Jadi saya minta angka dari panja, hasil panja dan hasil dari internal itu dipertahankan, 630 dan 650. Jadi saya setuju apa yang dikatakan Bu Diah ini, harus dipaksa, wajib dipaksa itu, ini juga kata-katanya Pak Jokowi Pak Menteri apa kemudian *sampeyan* harus dipaksa itu, pemerintah itu harus di paksa, kalau *ngelak-ngelak* karena eksekutif cenderung *leha-leha*, santai ini kata Pak Menteri katanya. Jadi ini *kan* jelas itu.

Jadi Pak Pimpinan, kita perjuangkan hasil rapat internal komisi itu, kita paksa itu dengan berbagai alasan *monggo*. Dulu juga kita, kita paksa nyatanya juga mendekati, kita ikut terjun ke lapangan waktu itu, semua sumur kita tinjau, ternyata juga apa yang dikatakan di sini dengan yang di lapangan berbeda jauh.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Mas Bambang.

F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ketua, saya pikir biar tidak terjadi perdebatan panjang saya pikir kita skor dulu sebentar. Jadi untuk diketahui bahwa rapat panja itu hasilnya yang ungu, namun tadi panja melaporkan kepada komisi terjadi pergeseran angka lagi, ini *nih* rapat internal, rapat internal, *kan* sifatnya panja itu ditugaskan komisi, *kan*.

Panja dipimpin salah satu Wakil Ketua Komisi, itu ketentuan di MD3 *kan*, *nah* rapat panja menghasilkan yang ungu. Rapat panja dilaporkan ke komisi ternyata terjadi pergeseran angka-angka yang seperti yang dibiru. Maka itu inilah keputusan Komisi VII Pak Menteri, *nah* ada disparitas antara usulan menteri 5 Juni dan rapat internal Komisi VII. Ini produk akhirnya, produk komisi yang biru Pak Menteri, yang biru. Panja melaporkan pagi-pagi sebelum rapat kerja, kami sudah melaporkan hasil kerja Panja dan dilaporkan ternyata ada pergeseran angka lagi.

Jadi terjadi pergeseran angka namun akhirnya yang angka biru rapat internal. Untuk itu agar menyingkat waktu saya pikir karena kesepakatan ini



sudah disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di Komisi VII. Jadi keputusan tertinggi di Komisi VII itu adalah keputusan komisi, *kan*.

Jadi untuk diketahui Bu Diah, saya salah satu yang ikut memimpin soalnya asumsi kemarin. Jadi saya pertanggungjawabkan bahwa angka itu 630-650 hasil usulan dari panja, namun ketika kami sampaikan di komisi ternyata ada pergeseran lagi disepakati 630-660.

Jadi saya pikir kita ingin mencari jalan tengah antara 597 ke.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Pak Bambang jumpa Pak Menteri berubah lagi.

F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

652 *kan*, bukan saya yang ini, fraksi kami, Fraksi Partai Gerindra mendukung angka moderat di 610-640.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya begini, udah, saya pikir kita lanjut aja, saya pikir udah ketemu *kok* satu konklusi karena *time constraint* juga.

Sekarang saya langsung lempar aja wacana konkret, pada prinsipnya rapat internal itu mengusulkan 630-660 Pak Menteri. Saya sebagai Pimpinan mengusulkan angka moderat 625-660 setuju, setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Pak Menteri, izin Pimpinan voting aja Pimpinan, jadi biar *clear*, kita kan belum setuju, Pimpinan ketok sendiri, harusnya voting aja, didengar dulu pendapatnya baru *clear*. Pimpinan udah ketok, *nggak* bisa, jadi di voting aja.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Setuju *nggak* Pak Menteri angka itu?

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, *skorsing* aja Pak Ketua.



F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Jadi biar enak *gitu loh*.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Kalau boleh saya sampaikan tambahkan, jadi kita mungkin *range*-nya jangan terlalu optimis juga karena juga angka-angka ini dan asumsi tadi *kan* udah menjadikan satu angka pendapatan untuk mendukung APBN. Tapi *kan* kalau misalnya meleset cukup signifikan *nah* ini juga akan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Dari Pak Menteri angkanya berapa?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Tadi saya sudah sampaikan kita berupaya untuk mengangkat dari batas bawah ke 610.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Angkanya Pak?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Range antara 610 sampai 640.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

610-640 masukin dulu usulan angkanya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ini usulan Pak Bambang sama Pak Menteri.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

610-640 udah *oke*, coba gini dulu saya mau lemparkan ke *floor*, usulan yang dimasukkan oleh Pak Menteri sebagai bahan negosiasi angka *lifting* kita disetujui *nggak* oleh forum ini?



F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Tidak.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Ntar dulu angka Pak Menteri terlalu rendah saya kira, saya kira usulan Pak Maman tadi, tadi *kan* Pak Menteri udah ngomong sedikit *nih* optimis kita 625, kita ambil saja 625-660.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Setuju *nggak* Pak Menteri?

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Kenapa Pak Menteri harus ke 610, tadi *kan* Pak Menteri udah ngomong *nih* 625 masih tercapai *lah* dengan segala *bla, bla, bla* tadi.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Voting aja Pimpinan, lebih bagus.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Jadi 625 itu adalah target, angka yang kita perkirakan yang bakal terjadi di tahun 2024 karena Lapangan Ande-Ande Lumut itu belum menghasilkan tahun depan, kemudian juga IDD juga baru alih dalam proses negosiasi untuk alih *participation interest*. Dan itu sesudah *participation interest* pun akan butuh waktu lama lagi untuk bisa eksploitasi.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya udah. Jadi kalau misalnya jadi Bapak kalau kita buat *range*-nya 625-660 tidak sanggup?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terlalu optimis.



**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya udah sekarang kalau kita turunkan di 620.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

610-640

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Tidak setuju, Pak.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan Pak Gunhar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pimpinan, Pimpinan 1 menit aja.

Jadi saya melengkapi apa yang disampaikan Pak Nasir, sebetulnya yang lebih paham *lifting* ini SKK. Kita kan belum dengar dari lapangan produksi Cepu, Balam, Abab, Jabung berapa cadangan minyaknya barel per hari.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Pak Gunhar jangan mundur lagi, itu sudah dibahas semua di panja.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Iya *nggak* ini mencocokkan aja Pak daripada kita muter-muter 610, 625, 630 *gitu*. Kalau dia udah kokretkan jelas bisa 700 iya *kan* begitu.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pimpinan, izin.

Apa bedanya 610 sampai 640 dengan 625 sampai dengan 650 sementara itu batas *range*-nya kan sama dari 610-640.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Saya pikir gini, ini biar kita mempertemukan kepentingan parlemen dengan kepentingan eksekutif, kalau angkanya 615-645 setuju Pak ya?



F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Tidak setuju.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Harus ada argumennya apa *sih gitu, kan* SKK yang harus jawab.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Waktu di panja ya kita ada rapat dengan SKK Migas dan SKK Migas udah.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar, silakan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Kalau saya pikir kita terlalu banyak kita ber-*argue* kembalikan saja ke 597-652.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Saya interupsi Pak, Pak Menteri jangan main-main ini, ini wakil rakyat.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Begini sebentar Pak Menteri, Pak Menteri sebentar.

Saya, kebetulan saya ini kalau jadi pimpinan saya ingin alur mekanisme Tatib diikuti ya, Pimpinan Sidang saya. Kalau ada yang tidak setuju dengan cara memimpin sidang saya silakan keluar dari aturan, jadi pimpinan sidang saya semua alur mekanisme sidang saya yang ngatur. Secara prinsip yang bisa saya komitmenkan proses demokrasi dan semua saya berikan kesempatan, itu dulu ya. Jadi tolong alur sidang ikut dari saya.

Silakan Pak Menteri gimana?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Kalaupun memang dibahas kita berupaya untuk mengangkat minimum *lifting*, ini adalah upaya optimis kita sampai dengan batas maksimum yang bisa kita upayakan. Makanya tadi kita sampai pada *range* 610, dari 597 ke 610 itu adalah *effort, effort* kita.



Untuk itu kita sampai pada angka yang tadi, ini menurut kami untuk perbaikan. Tapi untuk batas atasnya memang ada hal-hal yang memang harus kita antisipasi, kemungkinan-kemungkinan, kemungkinan tidak bisa terealisasinya.

Mungkin itu aja.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Pimpinan, maksud saya gini supaya ini menjadi kesepakatan semua fraksi *kan* ini belum putus semua fraksi dan tadi udah ada 3 kali rapat. Saran saya diskor dulu Pimpinan, Pimpinan sebagai pimpinan diangkat dari seluruh kesepakatan seluruh anggota sini menjadi pimpinan di sini. Jadi kalau bisa kita minta semua kita dudukkan bersama, diskor dulu supaya angkanya ini ketemu, ada 3 angka *nih* sekarang.

Pak Menteri juga tadi *kan* kita bilang, ini yang harus menjawab harus SKK karena *ndak* semua Pak Menteri tahu berapa jumlah sumur yang ada di Indonesia, yang tahu itu SKK tapi *kan* bolak-balik dibalikkan ke Pak Menteri *gitu loh*. Pak Menteri *kan* hanya ambil kebijakan karena memegang tampuk kepemimpinan sebagai Menteri ESDM, tapi teknisnya yang mengawasi K3S seluruhnya itu SKK.

Itu Pimpinan, jadi maksud kita 2 pimpinan ini kita bawa rapat kecil di sebelah kita tanya teknisnya, sebentar saja untuk mengambil angka ini *gitu* Pimpinan, saran supaya Pimpinan menjadi pimpinan yang paling.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

...(suara hilang 1.21.51)... gua kasih, mau sampai malam kita rapat gua ladenin, tapi yang penting ikut dulu, udah ya, cukup.

Silakan Pak Mukhtarudin.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Baik, dulu kita *kan* sebelum inikan ada rapat panja dan dengan SKK Migas juga sudah kita ada rapat. Dan kesimpulan dengan SKK Migas, bahkan sudah dijawab secara tertulis oleh SKK Migas bahwa *lifting* itu adalah di 630 sampai 650. Itu SKK Migas memberikan masukan ke kita sebagai panja.

Jadi saya kira dasar angka yang dibikin SKK Migas inikan bukan angka asal, kita jangan kayak tawar-menawar beli ikan kering di pasar Pak Menteri ya. Jadi kita harus berdasarkan analisis, obyektif, bahan pertimbangan-pertimbangan, segala macam.

Saya kira SKK Migas mengeluarkan angka 630 sampai 650 inikan tentu *tidak* asal keluar, tentu dengan segala pertimbangan dan hitung-hitungan dia.



Jadi saya kira angka SKK Migas ini memang, *nah* tadi Pak Maman malah memberikan solusi kalau kita bicara dengan SKK Migas itu 630-650 Pak, suratnya resmi masuk ke kita sebagai panja dan kesepakatan panja dengan SKK Migas. Saya kira bisa juga sebagai referensi ini dari SKK Migas ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Selanjutnya silakan Pak Bambang.

F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ini Pak Ketua, kayaknya harus skor dulu.

Jadi saya sepakat dengan usulan Pak Nasir, saya pikir kita skor dulu *kan*. Jadi untuk diketahui bahwa panja itu sifatnya rapat dengar pendapat tidak bisa memberikan keputusan tertinggi. Kita akan kirim ke Badan Anggaran itu hasil raker, hasil kesepakatan bersama Menteri ESDM salah satu sektor yang menjadi satu postur, di dalam postur anggaran itu sendiri.

Jadi saya pikir usulan kami, kami berharap ini diskor dulu kita kumpulkan Poksi-poksi dan Kapoksi-kapoksi karena sifatnya kita tidak mungkin ambil keputusan 55 orang *kan*, kita sifatnya adalah perwakilan fraksi, fraksi yang mewakili di komisi adalah Poksi.

Jadi sebenarnya apa yang sudah diputuskan, baik rapat internal maupun rapat panja itu sebenarnya keputusan fraksi-fraksi karena di situ setiap Kapoksi menunjuk anggota untuk duduk sebagai anggota panja.

Untuk itu saya pikir Pak Maman, Pak Ketua kita skors, kita kumpulkan Kapoksi-kapoksi untuk mengambil keputusan angka yang moderat untuk disepakati *gitu ya*.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya Pak Nasril gimana Pak Nasril, biasanya kalau Pak Nasril kasih petuah lebih mantap *nih*.

Silakan.



F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Konkret, Pak Menteri menyampaikan ilustrasinya 610-640, hasil panja 630-650 meskipun dianulir tadi pagi 630-650, 660. Sekarang kami meminta ya sebuah *reasoning* oleh SKK Migas untuk dibawa ke rapat kecil pada saat diskor nanti, memberikan *reasoning* antara pendapat SKK Migas dengan pendapat Pak Menteri, ini kenapa ada *dispute* ini sama-sama pemerintah juga setelah itu kita rapat diskor.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Tolong Tim Sekretariat yang Panja Asumsi itu coret aja, udah *nggak* penting itu rumusan panja itu, jadi biar *nggak* bingung nanti.

Ada lagi? Oke, sekarang saya masuk kasih tawaran terakhir. Sekarang pada prinsipnya kita setuju dan kita sangat memahami bahwa urusan *lifting* minyak ini dalam tahun ke tahun selalu turun dan kita sadar sekali minyak ini *nggak* bisa jurus urusan kayak mau nambang air, ini kayak nambang minyak *lah* begitu *lah* kurang lebih yang memang butuh proses waktu.

Sekali lagi terakhir saya sampaikan, Komisi VII mengusulkan 630 sampai 660. Namun dengan segala optimisme dan realitas kondisi riil hari ini mengusulkan dan meminta persetujuan kepada forum di angka 610 dan 640, kira-kira forum ini gimana?

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Tidak setuju Pak, kita harus menghargai Pak Pimpinan.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Kami memahami tapi minta *reasoning* daripada K3S.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak Menteri, kira-kira kalau SKK Migas memberikan penjelasan.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Perlu wakilnya *oke*, silakan.

Jadi memang kami minta menginginkan angka figur yang realistis karena juga kalau terlalu berlebihan juga selalu terjadi tiap tahun dan terus



terang waktu pembahasan itu antara K3S dengan SKK Migas, dari Direktorat Jenderal tidak ada yang mewakili.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Ini, ini semakin *nggak* jelas ini pemerintah ini.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Mohon maaf Pak Mukhtar jadi memang jadi memang waktu itu ada undangannya hanya demikian, *nggak* melibatkan dari kementerian.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar, jadi gimana Pak? Silakan Pak dijelaskan Pak, penjelasan justifikasi operasi dan teknisnya.

WAKIL KEPALA SKK MIGAS (NANANG A. MANAF):

Baik, terima kasih.

Mohon izin Pak Menteri.

Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Kami ingin menyampaikan *historical* mengenai usulan dari tahun ke tahun ya Pak, untuk bisa menggambarkan *gitu* bagaimana *struggle*-nya kami untuk menahan *decline*. Di tahun 2017 itu 801 *maincase*-nya itu 800.000 barel. Kemudian di 2018, 770.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ada *slide* presentasinya *nggak*?

WAKIL KEPALA SKK MIGAS (NANANG A. MANAF):

Ini yang kami presentasikan waktu SKK, ada, sudah ada.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan dijelaskan aja Pak.

WAKIL KEPALA SKK MIGAS (NANANG A. MANAF):

Di halaman 16 Pak, kemudian di 2019 itu 745 jadi turun lagi, kemudian 2020. 708, 2021 660, 2022 613 dan 2023 621.

Jadi kalau kita melihat angka-angka ini *decline rate*-nya itu antara 10% sampai 15% kira-kira *begitu*. Untuk menahan *decline rate* itu ada beberapa upaya, salah satunya adalah pemboran, pemboran pengebangan, yang kedua kegiatan kerja ulang atau kita istilahkan *work over*, kemudian ada juga kegiatan *well service*, *well intervention*, bahkan reaktivasi Pak.

Nah, upaya-upaya itu hanya bisa menahan *decline* *gitu*, supaya bisa mengangkat produksi tidak ada cara lain kecuali adalah mengembangkan lapangan baru hasil temuan eksplorasi. Contohnya di tahun 2016 ketika Banyurip *onstream* itu langsung nendang *gitu*, tapi setelah itu tidak ada lagi temuan yang sifatnya minyak, adapun kecil-kecil.

Nah ini yang kita harus pertimbangkan bahwa di satu sisi kita harus menahan *decline*, di sisi lain kita juga investasi juga *gitu* untuk mendapatkan seperti Banyuurip *case*-nya, itu kan harus eksplorasi Pak. Eksplorasi inikan probabilitasnya juga tidak besar, 110 atau 108 itu udah paling bagus.

Nah ini yang kami tawarkan kenapa skenario kami produksi di tahun ini *most slightly* itu 625, itupun sudah naik Pak dibandingkan dengan *outlook* di tahun ini. Tahun ini aja kita *outlook*-nya 621 dan itu lebih bagus dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang 612.

Memang problemnya begini Pak, saat ini *lifting* kita ini di titik ini 605 sebenarnya potensinya bisa 620, kenapa? Karena kita bolak-balik problem dengan *reability* dengan fasilitas produksi kita Pak. Oses kita dibangun '70-an sehingga sekarang udah 40 tahun lebih, udah *aging* Pak. Dulu pertimbangannya okelah kita perbaiki satu *section*, dua *section* ternyata *nggak* cukup Pak, itu harus dilakukan perbaikan komprehensif *lah*.

Nah itu butuh waktu dan butuh biaya, memang untuk awal kita harus investasi tapi ke depan harapannya kalau kita udah selesaikan masalah kebocoran pipa, ke depan kita sudah tidak mikir lagi. Sehingga *Lost Production Opportunity* (LPO) ini yang setiap hari ini kita 20.000 Pak kira-kira. Jadi harusnya sekarang itu di level 620.000 tapi karena ada problem dengan fasilitas.

ONWJ juga sama masalah *trip* masalah kelistrikan, termasuk juga di Rokan Pak. Rokan itu potensinya kalau dari kita melakukan sumur itu boleh dibilang semuanya di atas estimasi produksinya, tetapi problemnya itu tadi masalah *trade*, kemudian masalah kebocoran, kemudian masalah *lifting*.

Nah ini yang barangkali Pak menurut kami mungkin kita diberi kelonggaran dulu waktu karena waktu sekarang ini adalah memang mau tidak mau harus ada perbaikan-perbaikan yang signifikan terhadap *reability* produksi kita, untuk menghindari LPO, Pak.

Sehingga kalau kita punya kemampuan produksi 620 *lifting*-nya juga 620 harusnya, tapi karena terkendala dengan fasilitas maka yang terjadi adalah *lifting* kita 605, sebagian tertunda karena belum bisa kita *lifting* akibat dari apa *reability* pipa kita, Pak. Kalau kita pompa Pak, itu udah bocor, jadi problemnya



itu Pak. Jadi akhirnya kita tahan pompa kita, pelan-pelan kita alirkan supaya kita dari produksi bisa dikonversi menjadi *lifting*.

Itu aja Pak.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih penjelasannya Pak.

Silakan Pak Mukhtar.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Ini bingung juga saya SKK Migas ini, waktu di panja bersemangat sekali dan berkirim surat secara resmi kepada kita, ini lembaga resmi DPR RI, Pak. Panja itu dibentuk oleh komisi dan melakukan pendalaman terhadap masalah ini. SKK Migas sudah berkirim surat secara resmi pada tanggal 29 Mei 2023, mengatakan di situ *lifting*-nya 630 sampai 650, belum sampai sebulan Bapak berubah lagi, 625 lagi tadi *kan* ngomong dengan segala pertimbangan kira-kira 625 *lah* ini lagi. Ini gimana SKK Migas ini, apa karena ada Pak Menteri lalu takut, ini *kok* dibikin kayak amatiran begitu pemerintah, *gitu loh*.

Kalau memang kemarin hitung-hitungannya *nggak* bisa 630 ya dari kemarin ngomong 625, ini surat resmi *loh* Pak, silakan dicabut kalau memang mau berubah. Dicabut suratnya kalau memang ini, silakan mungkin komisi suratnya ada resmi ke komisi ada? Silakan tayangkan, resmi suratnya tanggal 29 Mei ditujukan kepada Panja Asumsi Dasar dan sudah kita bahas.

Jadi saya bagaimana ini SKK Migas, jadi kalau memang belum ada angka yang masif, jangan *dong* dikasih surat resmi ke sini. Ini *kok* amatiran banget kerjanya *gitu*, jangan dibikin kayak mainan ini republik, ini menyangkut orang banyak Pak. Menyangkut semua perhitungan, mengganggu postur APBN kalau salah-salah.

Saya kira ini Pimpinan jadi catatan SKK Migas ini, catatan kita ini apakah tidak bicara objektif atau yang obyektifnya yang 630 tapi karena posisi di sini lalu berubah lagi ke 625 saya *nggak* tahu, tapi hanya SKK Migas yang bisa menjawab itu.

Saya kira itu Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya, sudah cukup Pak Mukhtar? Cukup ya saya pikir ya.



Ya inilah Pak memang, makanya saya dari awal tadi saya udah sampaikan artinya kita setuju bahwa ada proses yang memang juga, sebetulnya sih kalau kita mau lihat Pak Menteri semangat teman-teman Komisi VII ini hanya ingin mendorong optimisme sebetulnya karena ada narasi besar yang selalu dibangun oleh teman-teman SKK itu 1 juta barel *gitu loh*. Artinya kalau kita mau punya narasi besar 1 juta barel ya harusnya ya berbanding lurus *lah* dengan semangatnya.

Oke memang ada argumentasi kita melakukan eksplorasi, melakukan temuan cadangan baru tidak bisa serta-merta dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun kita menghasilkan kemanfaatannya. Namun artinya apa yang disampaikan oleh Pak Mukhtarudin itu sebagai sebuah catatan bahwa dalam proses pengiriman dokumen ataupun data itu tolong betul-betul SKK Migas dan teman-teman ESDM menjadikan itu sebagai, mempertimbangkan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Nah kita memahami bahwa sebetulnya kalau dilihat dari angka sebetulnya kan angka definitifnya nanti itu *kan* kurang lebih yang diyakini oleh pemerintah itu *achievement* itu di angka 625 gitu ya. Artinya *range*-nya kurang lebih *plus-minus* di situ.

Nah sekarang begini Pak Menteri, saya setuju bahwa justifikasi teknis sudah disampaikan sebetulnya kita bisa diangka 6 kalau saya dengar tadi ya, dari angka 610-635 sebetulnya. Namun kan ada *plus-minus* di situ, artinya ada kondisi *oke forecast* kita kurang lebih sekitar di 625 atau 630. Namun karena ada hambatan operasi, hambatan produksi dan lain sebagainya akhirnya kadang-kadang di 605-610.

Sekarang saya mau lempar saja, udah kita langsung persingkat saja saya pikir tidak perlu lagi *lah* kita langsung karena ini *kan* ini tinggal satu hal ini, yang lain kan hampir sama itu sebetulnya angkanya. Saya ingin sampaikan kembali lagi dengan angka 610 sampai 640 ini kita bisa setuju ya?

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Tidak, berat itu, tidak setuju itu.

Harus menghormati keputusan Komisi VII, ini tidak menghormati. Jadi hanya semau-maunya sendiri dan saya minta Pak Pimpinan, SKK Migas menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Mukhtarudin, itu kunci itu. Jadi ini yang ngomong kan Bapak sumur tua ini, Bapak sumur tua ini sudah ahli sebetulnya teknisnya. Mungkin ini Pimpinan SKK Migas yang baik diganti ini saja, *gitu* Pak. Jadi jangan kita rapat panja sama rapat internal mengeluarkan pikiran-pikiran dengan yang luar biasa, tidak sekedar kita hanya rapat kumpul-kumpul seperti RT *gitu*.

Terima kasih.



**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baik, kalau *gitu* gini aja kita skor 5 menit dulu ya untuk dan saya minta masing-masing Poksi untuk ikut nanti di rapat, terima kasih.

Rapat kita skor 5 menit.

**(RAPAT DISKOR PUKUL 14.45 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 15.19 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

**(ditranskrip dari rekaman live streaming youtube
menit ke 51.11)**

Terima kasih.

Pak Menteri dan Rekan-rekan Komisi VII.

Tadi *alhamdulillah* kita diantara Kapoksi sudah melakukan lobi dan komunikasi dan ketemu juga pada satu titik konklusi dan saya juga tadi diminta oleh teman-teman mewakili Komisi VII untuk juga bicara dengan Pak Menteri. Dan *alhamdulillah* apa yang memang sudah disepakati tadi ketemu satu kesepakatan dan konklusi.

Saya langsung saja Pak Menteri ya konkret ya kita karena waktu juga ini, bisa ditampilkan lagi. Ya saya mulai tadi kita cukup panjang perdebatan mengenai *lifting* migas ini memang kita semua memahami dan sangat mengerti situasi riil terkait produksi migas nasional kita, namun di sisi lain semua upaya sedang kita lakukan termasuk Komisi VII juga sedang mendorong percepatan realisasi pembahasan RUU Migas yang *inshee* Allah akan kita kejar di masa periodisasi ini akan selesai, harus selesai demi untuk mendorong percepatan *support* terkait regulasi dan aturan di industri migas kita.

Terkait mengenai *lifting* migas tadi sudah disepakati antara kami, kita di angka 615.000 barel oil per day sampai 640.000 barel oil per day. Tentunya ada pertanyaan kenapa 615? Karena begini asumsinya adalah produksi triwulan pertama ini ya, triwulan pertama ini adalah di angka 613.000 barrel oil per day.

Nah ada pesan tadi dari teman-teman dari PKS dan sebagian besar mengharapakan ada optimisme dan dorongan yang kuat kepada pemerintah untuk serius, apa, meningkatkan produksi ini karena semakin meningkatnya



produksi nasional kita tentunya akan berbanding lurus juga terhadap peningkatan pendapatan negara kita, jadi itu setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Ya kita masuk ke *lifting* gas bumi yaitu angkanya sama di angka 1.030 sampai 1.036 ini juga tadi kita apresiasi, jadi pemerintah juga di satu sisi memang kita kalau terkait minyak kita belum bisa, kita relatif realistis mungkin bukan pesimis ya Pak ya, reaktif realistis. Namun khusus untuk gas kita bisa relatif lebih optimis karena produksi gas kita di beberapa lapangan cukup bagus, jadi di angka 1.030 sampai 1.036 barel oil ekuivalen, setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Nah terkait *cost recovery*, tadi juga udah kita sepakati diangkat 8,0 sampai 8,25 miliar US dolar setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Terkait volume minyak tanah 0,575 sampai 0,580 setuju?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Terus solar itu diangka 1816 sampai 1900, volume LPG itu diangka 8,2 sampai 8,3.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan, saya rasa kalau LPG 3 kilo.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Siapa ya tadi? Oh ya Bang Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Perlu dipertimbangkan Pimpinan karena di tahun-tahun politik ini ya kita maunya *kan* ke depan kalau ada perhelatan politik, ini *kan* pesta rakyat. *Nah* pesta rakyat dalam menghadapi 5 tahun sekali, jadi isu LPG 3 kilo ini jangan menjadikan isu politik ya, jadi agak diberi kelonggaran lah Pimpinan.

Itu maksud kami, angka batas bawahnya itu jangan 8,2 ya 8,38 lah di balik sampai 8,5.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

LPG 3 kilo itu 8,38-8,5.

Iya selanjutnya Pak Nasir, oh Pak Gunhar ya, bagaimana Pak Gunhar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Sepakat Pak Nasril kalau terendah 8,3 sama tingginya 8,5.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan.

Kalau kita ngusulkan satu aja 8,5 saja sekalian, mungkin nanti tinggal diperjuangkan di Banggar supaya kebutuhan LPG 3 kilo ini benar-benar tepat pada sasarannya. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, jadi berbagai macam.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya silakan Pak Ramson.

F-GERINDRA (Dr, RAMSON SIAGIAN):

Saya mengusulkan 8,3 ke 8,5 karena ini *kan* masih pagu indikatif nanti pembahasan sesudah RAPBN baru bisa kita putuskan, apakah 8,3, apa 8,4 atau apa 8,5.

Terima kasih Pak Ketua.



**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan respon dari Pak Menteri, gimana Pak?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Iya kalau perkiraannya pertumbuhan ini *kan* juga kita me-*refer* kepada tahun-tahun sebelumnya, jadi cuman adanya kemungkinan yang tadi sampaikan oleh Pak Nasir ya kita ambil *range* tapi dalam, masih dalam plafon plus minus 5%.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya gini aja.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Pimpinan, sedikit Pimpinan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya Pak Mukhtar.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Saya kira LPG 3 kilo ini ke depan kebutuhannya meningkat, yang pertama *converter kit* nelayan, petani *kan* juga sedang jalan, itu juga belum ada tambahannya. UMKM, belum lagi ada daerah-daerah yang belum terkonversi, *miten*-nya sudah *nggak* ada, tapi belum konversi ke gas. Kayak di Kalteng aja masih ada beberapa kecamatan yang belum konversi. Artinya kalau ini semuanya pemerataan energi ya, kalau semuanya dikonversi khususnya di Kalimantan Tengah saja ini akan nambah Pak Menteri.

Oleh karena itu tentu kita berharap daerah-daerah yang akan, makanya saya mengusulkan Kalteng kayak ada di Sampit, di Lamandau, ada beberapa itu belum konversi ke migas, *eh* ke gas, sementara juga minyak tanahnya sudah *nggak* ada. Jadi ini akhirnya *kan* menarik kepada kebutuhan-kebutuhan lain. Oleh karena itu saya kira beralasan kita untuk menaikkan daripada kuota daripada LPG 3 kilo ini.

Saya kira itu Pak.



**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya, terima kasih Pak Mukhtarudin.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Izin Pimpinan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya silakan Prof. Mul.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Kami mengamati angka realisasi tahun 2022 dan *outlook* tahun 2023 itu pada angka 7,9, jadi usulan panja kita dan rapat internal kita 820 sampai 838. Pertimbangan kami pasca pandemi ini ekonomi masyarakat bergerak ya akan ada penambahan sedikit. Namun angka ini kami merasa sudah cukup *fit*.

Demikian.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, ini memang saya *nah* ini mohon dimaklumi Pak Menteri, kalau urusan rakyat ini memang tadi kita takutnya sama ketua fraksi sama ketua umum, tapi kalau bagian bawah kita takut sama rakyat, Pak Menteri.

Jadi mohon dipahami karena yang bisa copot-copot ganti, makanya harus dipahami juga kalau terkait LPG 3 kilo ini cukup lumayan menjadi perhatian karena kalau minyak tanah sama solar *kan* upaya konversi sudah berjalan signifikan oleh pemerintah.

Namun begini saja tadi dari semuanya, namun di sisi lain saya setuju dengan pendapat teman-teman terkait volume LPG ini tapi saya juga berkepentingan dalam rapat ini nanti kita buat suatu catatan, apa, kita meminta sekali lagi rapat mengagendakan untuk memanggil Pertamina terkait penjelasan secara teknis antara Pertamina dengan Dirjen Migas untuk menjelaskan secara teknis terkait realisasi penggunaan dan pemanfaatan LPG 3 kilo ini.

Jadi saya mohon setuju ya? Jadi *nggak*, karena gini supaya kita betul-betul *kan* ini kita masih sepakat di angka di angka *range gitu*. Jadi kita minta nanti di sini kita minta Pertamina dengan Dirjen Migas kita agendakan untuk



pembahasan detail secara teknis, memberikan laporan terkait penggunaan volume LPG 3 kilo ini.

Jadi karena tadi rata-rata di angka 8,3 jadi saya pikir dan dari pemerintah juga meminta di 8,2 jadi gimana kalau kita setuju di 8,2-8,3 ya? *Oke.*

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Lanjut subsidi minyak dan gas, tapi nanti tolong dimasukkan di catatan-catatan rapat Bu, sebagai bagian dari kesimpulan untuk mengagendakan Dirjen Migas dengan Pertamina untuk kita agendakan rapat.

Subsidi minyak dan gas tetap solar di angka 1.000 sampai 2.000 rupiah per liter, setuju ya?

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan, subsidiya setuju cuman perlu penegasan pada Pak Menteri dan Pak, izin Pak Menteri untuk Pak Dirjen. *Nah* ini banyak sekali SPBU nakal yang menimbun, yang menimbun SPBU apa, ini biosolar ini yang subsidi ini Pak Menteri. *Nah* saya kemarin mendapatin dia tiap hari itu 8 KL, tapi yang dijual 6 KL. *Nah* 2 KL-nya itu tiap hari hanya bahasanya untuk *emergency*, *nah* itu satu orang ini punya SPBU 3 Pak Menteri.

Nah ini perlu menurut saya hampir, mungkin hampir sama ya *nggak* semua tapi banyak menurut saya SPBU yang dilakukan harus segera dilakukan pemeriksaan oleh Pak Dirjen, mungkin tim dari kementerian *lah*. *Nah* kalau ada SPBU yang nakal seperti ini untuk segera dicabut saja izinnya dan dilaporkan ke pidananya *gitu*.

Nah ini setiap hari Pak, itu ada nanti videonya ada saya kirim juga ke Bapak. *Nah* kalau bisa PT itu jangan dikasih lagi *gitu*, *nah* itu udah berulang-ulang tiap hari 2 KL kali 3 perusahaannya, berarti 6 KL dia menjual ke dari subsidi ke industri.

Mungkin itu aja, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Saya setuju itu Pak Menteri, itu banyak di daerah Sumatera dan Kalimantan dan Sulawesi yang daerah pertambangan. Jadi itu modusnya itu masuk lewat SPBU, dia distribusikan ke beberapa tambang-tambang di dekat seputaran situ karena ada yang menarik kayak di Kalimantan Barat, sebelum peti itu di *stop* oleh polisi minyak langka, tapi setelah peti itu di *stop*, *loh kok* minyak tiba-tiba banjir. *Nah* itu kan tanda tanya tuh, jadi saya pikir itu setuju yang disampaikan oleh Pak Nasir itu.



Nah yang terakhir itu terkait ini juga tadi Pak Menteri, buat Pak Dirjen sebagai catatan juga. Tadi menindaklanjuti disampaikan oleh Pak Nasril, kita ini *kan* menjelang tahun politik pasti segala hal itu bisa dijadikan di politisir Pak Dirjen, segala hal isu. Kita ingin juga itu terkait volume LPG yang tahun ini, yang awalnya dibatasi itu tolong segera di-*release* Pak karena biar di lapangan *nggak* ribut, nanti takutnya kita jaganya begini, nanti kalau LPG langka di beberapa titik, nanti disikat lagi seakan-akan pemerintah begini. Jadi kita *nggak* mau, kita jaga itu aja Pak, jadi biar ini, itu aja.

Lalu yang terakhir, subsidi listrik 7,73 sampai 75,7 triliun setuju? Setuju ya.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Alhamdulillah, selesai juga urusan barang ini.

Jadi ya terima kasih, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasama dari teman-teman fraksi di Komisi VII dan Kementerian ESDM. *Alhamdulillah* kita sudah menyepakati pagu indikatif asumsi makro APBN 2024.

Dan pesan kami dari pimpinan buat rekan-rekan Komisi VII yang di Banggar agar bisa mengawal kesepakatan asumsi makro ini sampai di Banggar karena berdasarkan Tata Tertib MD3 dan Tata Tertib Persyaratan Sidang kita, pembahasan di Banggar itu berdasarkan usulan dari Komisi VII. Artinya apabila ada hal-hal yang berpotensi berubah, mohon dikonsultasikan dengan kami-kami yang Pimpinan dan Komisi VII. Iya artinya harus di kita bahas lebih lanjut, jadi itu terkait asumsi makro ini.

Silahkan Pak Gunhar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota yang terhormat,
Bapak Menteri juga beserta jajarannya.

Saya ingin menambahkan sesuai dengan jadwal agenda rapat kita hari ini selain daripada pembahasan asumsi makro dan lain-lain. *Nah* dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Menteri terkait dengan perubahan perpanjangan kontrak karya menjadi IUPK PT Vale Pak.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Sorry, sorry begini, begini, mohon maaf, mohon izin Pak Gunhar.



Boleh *nggak* sebelum Pak Gunhar masuk situ, kita hanya minta sebagai bagian dari mekanisme sidang ternyata Pak Menteri perlu merespon dan hanya menyampaikan untuk penyampaian RKAKL, sedikit aja, 5 menit aja, boleh ya? Biar kita tuntas.

Iya silakan Pak Menteri direspon dan sekaligus Pak Menteri memberikan penyampaian untuk terkait penilaian lanjutan pembahasan RKAKL yang akan nanti kita bahas dengan Dirjen Eselon 1.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Jadi tadi sudah kami sampaikan sebetulnya RKAKL sebagai kelanjutan daripada asumsi dasar tadi yang telah kami sampaikan, apakah perlu kami sampaikan kembali? Singkat kami sampaikan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan, sudah ya tadi, sudah ya? *Oh* ya udah *oke*, terima kasih, mohon maaf Pak Menteri.

Iya silakan Pak Gunhar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Iya terkait dengan investasi saham 50%, 51% yang disampaikan pada RDP-RDP terdahulu Pak bersama beberapa gubernur di daerah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Tengah karena ini menyangkut amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), “di mana kekayaan alam itu dikuasai negara dan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat”.

Besar harapan kami di lembaga DPR ini bersama Pak Menteri ESDM juga berharap kepada kepemimpinan Bapak Jokowi untuk kembali membuat suatu prestasi Pak, bukan hanya pada Freeport yang kita kuasai 51%, tetapi juga pada PT Vale ya karena ini akan menjadi catatan sejarah dalam kepemimpinan bangsa ini. 51% tertuang dalam era kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi.

Mungkin itu saja dulu Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatillahi wabarakatuh.



**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan Prof. Mul.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Baik, terima kasih.

Ada dua hal dari saya, yang pertama lain-lain ini kami ingin mendorong Kementerian Pertanian terutama nanti kaitannya dengan program di tahun 2024 ya dan 2023 juga. Yang pertama adalah bahwa pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian ini harus betul-betul memperhitungkan dampak lingkungan, yang pertama itu.

Kami mendapat laporan dari masyarakat melalui Twitter, Instagram ini di Maluku Utara Palawan Obi, ternyata produksi nikel kita di sana *tailing*-nya dibuang ke laut, sehingga menimbulkan pencemaran biota laut yang masif. Oleh karenanya kami meminta agar dicari dipikirkan alternatif agar *tailing*-nya itu dibuang di tempat lain yang tidak berbahaya, yang bisa tertahan.

Kita jangan sampai mengulangi kasus yang di Buyat dulu, saya masih ingat di Buyat karena saya paham, ikuti masalah itu. Itu menimbulkan dampak bagi lingkungan, *nah* ini mohon dipikirkan sehingga betul-betul terjaga.

Yang kedua, terkait investasi nasional. Kami minta kepada pemerintah agar konsisten menjalankan Undang-Undang Minerba, kemarin Freeport *kan* seharusnya dilarang itu ekspor dan akhirnya dilanggar, diberikan izin. Yang kedua sekarang ini terkait dengan Undang-Undang Minerba divestasi 50% secara bertahap, 51% secara bertahap.

Kami juga menginginkan sepakat dengan teman sebelumnya bahwa perpanjangan Vale ini harus tunduk pada aturan ini, harus ada pertanyaan secara bertahap menjadi 51% dan kami di panja mendapatkan laporan dari para gubernur itu harapan mereka dan juga harapan kita semua.

Yang kedua terkait dengan Blok Masela, Blok Masela *kan* ini *kan* *nggak* konsisten Shell ini, sepertinya udah nyerah mengundurkan diri tapi *kok* gantung-gantung. Bahkan seperti terkesan bagi kami pengin dapat untung juga, kalau memang mau teruskan, kalau *nggak* ya sudah serahkan kepada yang berminat, ada Petronas, ada Pertamina ya *kan*.

Kalau tidak tegas Pak Menteri diterminasi aja, terminasi POD-nya *nggak* diperpanjang, *zero*, hangus terbakar. Saya *nggak* dapat apa-apa hilang uangnya, *nah* ini *kan* harus ada jalan yang bagus, seharusnya saya memahami kondisi ini, jangan dianggap kita pemerintah lembek, karena teman-teman di



Maluku kan sangat berharap ini berjalan, jangan sampai terkatung-katung ya, kita di apa istilahnya, digantung oleh PT Shell ini.

Sekian Pimpinan, dari kami.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak Mul.

Sebentar, saya kasih ke Pak Ramson dulu ya tadi dia dari tadi, baru habis itu Laksamana Chengho.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatllahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Ini poin lain-lain Pak Menteri yang saya hormati, Blok Masela memang perlu ada keputusan strategis dari pemerintah. Sehingga tidak terkatung-katung, kalau diperlukan proposal bisa kita siapkan Pak Menteri, solusi terbaik tapi realistis, tapi kalau tim Pak Menteri sudah siap *alhamdulillah*, tapi yang penting perlu ada kebijakan yang konkret dan tidak terkatung-katung karena itu untuk kepentingan bangsa Indonesia dan tentu kepentingan energi masa depan dalam proses *energy transition*.

Yang kedua bahwa pemerintah yang dalam hal ini dalam saat Pak Menteri ESDM sekarang menyampaikan bahwa 2060 akan masuk ke *Net Zero Emission* biarpun mungkin itu maksudnya untuk listrik, tetapi juga untuk kendaraan bermotor yang masih menggunakan energi fosil trennya oleh pemerintah dan juga global masuk ke *electric vehicle*, artinya membutuhkan baterai listrik, *electric vehicle battery*.

Salah satu komposisi yang diperlukan untuk memproduksi itu secara massal adalah nikel, sementara area terbesar, produksi terbesar Vale Indonesia. Dalam struktur sahamnya sekarang di mana itu hanya 20% masih oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini BUMN Mind-ID, 20% memang masuk ke publik ke pasar, tapi kalau di publik itu investor-investor yang terbesar adalah dari asing juga untuk yang di stok market dan 60% dikuasai oleh Vale Internasional dan juga Sumitomo.

Saya melihat dalam komposisi saham ini bagaimana agar BUMN yang dimiliki oleh pemerintah mempunyai hak suara mayoritas dalam membuat keputusan. Dari analisis saya kalau Mind-ID mempunyai saham konsolidasi 40% saja sudah bisa membuat keputusan.



Artinya mempengaruhi keputusan strategis dari Vale Indonesia, sehingga saat diperlukan dalam proses pergantian dari kontrak karya ke IUPK itu agar pemerintah mem-*push* untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan strategis masa depan, untuk kepentingan pencapaian *Net Zero Emission* agar di-*push* paling tidak saham BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah itu Mind-ID bisa mencapai 40% konsolidasi. Sehingga mempunyai hak suara yang kuat, menjadi penentu di dalam membuat keputusan strategis Vale Indonesia.

Nah itu saya pikir pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM harus punya keberanian membuat kebijakan-kebijakan strategis dan keputusan untuk itu, untuk kepentingan masa nanti Pak, jadi bukan untuk kepentingan generasi kita, tapi 2-3 generasi yang akan datang sesuai dengan visi pemerintah juga untuk tahun 2060 masuk ke *Net Zero Emission*.

Kira-kira itu Pak Menteri, itu Pak Ketua, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatillahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terpenting itu tadi satu Pak Menteri, beliau siap memberikan proposal tawaran konkret penyelesaian Blok Masela, bukan *gitu* Mr. Bond? Jika diperlukan.

Terima kasih.

Iya selanjutnya saya kasih ke Laksamana Cheng Ho dulu Pak, habis itu baru.

Silakan.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum

Baik saya ulangi, *Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*,
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan Rekan-rekan Komisi VII, serta Bapak Menteri beserta jajarannya, serta semua lembaga yang hadir pada sore hari ini.

Saya ingin menyinggung tentang hal-hal lain yang akan kita bahas dalam raker kita pada kali ini. Pak Menteri, minggu kemarin ini kami agak terkaget-kaget terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 ya *kan*, yaitu tentang



pengelolaan hasil sedimentasi di laut, ya singkat kata ini sebetulnya izin tentang pemanfaatan pasir laut.

Pak Menteri, setahu sepahaman saya sampai hari ini bahwa tentang pemanfaatan laut itu akan ada 4 hal, yang pertama tentang perikanannya dan itu dari dulu dibahas oleh dan dikelola oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Kemudian yang kedua tentang pariwisata dan itu dikelola langsung oleh Kementerian Pariwisata. Lalu tentang penambangan laut, itu tentunya dikelola dan diatur oleh Kementerian ESDM. Kemudian yang keempat adalah tentang perhubungan laut, ya *kan* dan ini diatur oleh Kementerian Perhubungan.

Kami melihat ada kesesatan regulasi ya pada terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 ini Pak Menteri, kita lihat apa yang ada di dalam PP ini. Dikatakan bahwa memuat tentang rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, pengawasan, penjualan, termasuk ekspor hasil sedimentasi di laut. *Nah* ini kita agak jadi bingung seperti itu, karena kenapa? Yang kami dengar bahwa yang menjadi *lead* daripada PP ini, ini menjadi kewenangan daripada pengaturan oleh Kementerian KKP.

Nah di sini terjadi kesesatan regulasi saya pikir dan ini perlu kita luruskan, kenapa demikian? Kita lihat ini saya lihat-lihat lagi pada beberapa pasal pada PP Nomor 26 Tahun 2023 ini ya, bahwa contoh misalkan pada Pasal 9 Bab IV tersebut dikatakan bahwa pemanfaatan pasir laut adalah untuk reklamasi dalam negeri, izin saya *hold dulu, oke*, pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha dan ekspor.

Jelas ini adalah merupakan kegiatan penambangan, jelas ini karena kenapa? Objeknya pasir laut *kan* seperti itu, ini yang saya bilang kesesatan regulasi kenapa demikian? Kita lihat lagi, kalau memang di dalam Pasal 11 dikatakan "pelaku usaha wajib menjamin dan memperhatikan keberlangsungan dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi pembersihan, keseimbangan dan menjaga keseimbangan pelestarian serta fungsi lingkungan pesisir".

Kalau ini urusannya KKP ini adalah urusannya adalah urusan tentang perikanannya, sedimentasi yang ada di laut itu adalah mustinya merupakan *resources* mereka, karena kenapa? Di situlah sumber plankton, *kok* sedimentasi lumpur dihilangkan, lumpur ya lumpur, sedimentasi ya sedimentasi, pasir laut adalah pasir laut dan itu adalah mineral.

Saya tegaskan Pak Menteri, Komisi VII tidak rela untuk urusan pasir laut ini, ini *kok* diurus oleh KKP. Pak Menteri harus menyatakan sikap, *nggak* bener ini. Belum lagi persoalan riuhnya akibat masalah ini, saya dari Bangka Belitung Pak Menteri, ini di grup WA itu sudah ramainya minta ampun, beberapa orang bertanya-tanya kepada saya ya *kan* tentang bagaimana tentang ekspor pasir laut ini. Ini *kan* *nggak* bener, nah ini kami pikir ini perlu satu apa, satu juga dukungan sikap dari kawan-kawan Komisi VII tentang pemanfaatan ini. Ini *nggak* bener dan kita harus luruskan ini.



Oleh karena itu saya pikir kalau memang *nggak* jelas ya lebih baik ya kita tolak, kecuali ini sudah jelas bagaimana regulasi dan sebagainya, sehingga ini betul-betul menjadi apa namanya, menjadi satu regulasi yang memang mengatur sebagaimana mestinya.

Sekali lagi saya sampaikan Pak Menteri, sedimentasi itu *kan* memang harusnya oleh Kementerian KKP itu ditambah lagi terumbu karang, bukan malah dibersihkan. Kalau sedimentasi untuk alur pelayaran, silakan iya *kan*, sehingga itu harus dibersihkan lumpur-lumpur itu, tapi itu urusan Kementerian Perhubungan *loh*, ngapain KKP. Inilah yang saya bilang kesesatan regulasi.

Saya pikir demikian Pak Menteri dan Rekan-rekan sekalian, tujuh kali tujuh sama dengan empat puluh sembilan, setuju *nggak* setuju ini sudah saya sampaikan.

Wassalammu'alaikum warahmatillahi wabarakatuh.

Selamat sore,

Salam sejahtera untuk kita semua.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Memang saya sekedar menambahkan saja Pak Menteri, terkait pasir laut ini jangan lihat hari ini. Ini saya meyakini rapat kita ini direkam dan di *tapping*, artinya ada rekaman, silahkan nanti kita buktikan perkataan saya kurang lebih 2 tahun, 3 tahun lagi.

Artinya *nih* kalau *nggak* di hati-hati betul, ini berpotensi menjadi *dispute* ataupun tumpang tindih wewenang dan aturan. Berbahaya *loh* karena pada saat kita memulai sesuatu yang sudah *nggak* benar, ke depannya pasti hasilnya bahkan banyak *nggak* bener karena orang jadi bingung, *loh* pasir mau pakai kata sedimentasi, pendalaman alur ataupun alur transportasi laut, *whatever* apapun itu tetap ada pemanfaatan sumber daya alam yang diproduksi, yang dibeli atau yang diangkut.

Itu ranahnya ranah rezim IUP, *nggak* bisa *tuh* pakai pendekatan-pendekatan sedimentasi-sedimentasi, ya silakan aja proses rezim perjalanan IUP yang biasa saja, *nggak* usah lagi pakai muter-muter *gitu*.

Maksud saya pada prinsipnya dalam konteks pemanfaatan pasir laut untuk kepentingan sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat banyak, negara, peningkatan pendapatan negara kita setuju, tapi *nggak* perlu mutar-mutar, ya sudah kalau udah ada ESDM *kok* ngapain mesti harus mutar-mutar ke KKP, nanti mutar-mutar lagi ke Perhubungan *gitu*, jadi berputar-putar.



Jadi jangan sampai nanti kalau berputar-putar jadinya kayak lari dalam sebuah *velodrome*, terus berputar-putar sampai pada akhirnya kita *nggak* tahu siapa yang dikejar siapa yang mengejar, itu aja.

Jadi ini saya wanti-wanti betul-betul *loh* jadi kondisinya, nanti detailnya segala macam saya pikir bukan ini forum yang pas untuk kita membahas lebih jauh, tapi saya sekedar merespon saja yang disampaikan oleh rekan saya Pak Bambang Patijaya. Saya pikir itu, ini hanya sekedar buat tambahan wacana kita ya.

Selanjutnya silakan Pak Sartono mohon izin, Pak Nasril dulu baru nanti Pak Sartono, habis itu ke yang punya Kalimantan Tengah.

Silakan Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mohon maaf singkat aja Bang ya, kita karena waktu juga ya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Siap.

Pak Menteri dan jajaran yang kami hormati.

Pertama menyikapi apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu, Pak Menteri biasanya kalau dalam penyusunan undang-undang kalau ada 1, 2, 3 yang berbicara dalam rangka perundang-undangan itu biasanya masuk ke batang tubuh.

Nah ini kalau memang ada 1-2 aspirasi ataupun respon terhadap persoalan kekinian tentunya ini kita berharap kepada pimpinan dapat diberikan pada rekomendasi kesimpulan, terutama mengenai Vale tadi. Kenapa kami sampaikan tentang Vale masuk kepada kesimpulan pertama? 50 tahun sudah berjelang, dari Inco dan 2 tahun 2025 mengakhiri kontrak karya.

Tentunya pada masa IUPK ini kami berharap sebuah *legacy* daripada Kementerian ESDM yang pada hari ini mempunyai wewenang di dalam menyahuti perpanjangan karena apa? Apa yang disampaikan oleh Saudara Pak Ramson tadi bahwa keinginan kita adalah untuk mendapatkan posisi 51% saham Republik, saham merah putih.



Nah untuk mendapatkan saham merah putih tadi kita berbicara dengan Pak Menteri bahwa sudah sejauhmana hilirisasi yang dimiliki oleh negara? Pak Menteri mengatakan cuman IBC yang akan terintegrasi, tetapi dari mineral-mineral yang lain kelihatannya belum kelihatan, kecuali Freeport.

Nah untuk nanti ini kami berharap pada posisi nikel ini bisa nanti didudukkan, Pak Menteri bersama dengan Menteri BUMN diundang dalam rapat gabungan bersama Komisi VII untuk menetapkan dan menyiasati terhadap kepemilikan saham Republik tadi yang pada masuk kalau konsolidasi 40% tentunya kita berharap pada sisi 51% tadi. Kenapa?

Hari ini kalau kita lihat beberapa catatan bahwa pencatatan aset-aset Vale itu *nggak* berada di Republik Indonesia, pencatatannya hanya di negara Kanada. *Nah* ini sesungguhnya kita berharap kedaulatan terhadap mineral kita *tuh* berada di sini, ini sebuah kebanggaan kita, maka pada akhir pemerintahan ini kita berharap Komisi VII mempunyai *legacy*, Pak Menteri punya *legacy* dan pemerintahan juga punya *legacy*, satu hal.

Yang kedua Pak Ketua, kita berharap bahwa ke depan ada beberapa catatan-catatan terhadap isu-isu yang harus kita dorong untuk mengangkat sebuah isu ini menjadi sebuah *legacy* Komisi VII bersama Pak Menteri, seperti terhadap apa yang disampaikan oleh Saudara Bambang Patijaya PP 26 terhadap, kalau isu di luar *wah* negara ini sudah menjual negara, padahal tidak *kan* begitu, *nah* isu ini perlu diluruskan.

Kami menginginkan tata kelola yang hari ini di tangan Pak Menteri ini berkonsolidasi dalam tata niaganya, tata kelola itu *kan* di tangan Pak Menteri, tetapi tata niaganya yang hari ini ada di Menteri KKP.

Nah ini yang sesungguhnya kita ingin Pak Menteri punya *power kan* begitu, punya *power*, *lead*-nya di sini adalah Pak Menteri ESDM, bukan Menteri Perhubungan dan bukan Menteri KKP. Sama juga yang kita bicarakan tadi, di *surveyor gitu* juga, Pak Menteri hanya mengatur tata kelola tapi tata niaganya pada kementerian yang lain.

Ini kami berharap Menteri ESDM ini merupakan tumpuan harapan kita bersama di dalam mengelola tentang pertambangan dan sebagainya.

Dan yang terakhir Pak Ketua, tentunya kami minta agenda, minta agenda untuk membicarakan isu-isu yang terkini di dalam berkembang di tingkat nasional dan tentunya catatan kami, kami berharap ada sebuah kesimpulan apa yang telah dibicarakan oleh teman-teman terdahulu yang merupakan ada 2, 4, 5 orang tadi bicara.

Terima kasih.



**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak Nasril.

Habis Pak Nasril Pak Sartono, terakhir yang punya Kalteng kita *close* ya, *oh* masih ada lagi, iya ini terakhir Pak ya, terakhir ya nanti dari sini ya karena waktu juga udah sore karena ini nanti kita bisa lanjut kita elaborasi di agenda lebih lanjut, *kan* ada permintaan dari Pak Nasril.

Silakan Pak Sartono.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati para sahabat Komisi VII yang kami hormati,
Bapak Menteri dengan seluruh jajarannya,
Yang kami hormati Kepala Migas, SKK Migas dan seluruh jajarannya.

Assalammu'alaikum warahmatllahi wabarakatuh.

Saya juga juga ikut tergugah *begitu* Pak Menteri tentang apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi Patijaya, yang saya tanyakan Pak Menteri izin ekspor pasir ini oleh presiden ikut *cawe-cawe* *nggak* ini Pak Menteri, dilibatkan *nggak gitu* Pak Menteri *gitu*.

Ini kebijakan yang selama ini 20 tahun itu *kan* di *stop* ya oleh Presiden Megawati, Ibu Megawati waktu itu dan itu juga sudah melalui kajian yang mendalam permasalahan-permasalahan yang mendalam bahwa eksploitasi daripada ekspor pasir ini.

Yang saya khawatirkan begitu, jangan sampai kebijakan ini, apa, akan menenggelamkan pulau-pulau itu, biasanya izinnya pasir, eksploitasi ekspor tapi kejadian-kejadian sebelumnya itu pulau-pulau itu Pak, pulau-pulau kecil itu diambil itu, tidak hanya pasirnya saja, jadi pulau-pulaunya itu dan tadinya kita 17 ribu pulau itu berkurang kita pulaunya dengan.

Ini dalam artian ini akan memberikan legalisasi percepatan didalam eksploitasi ekspor daripada pasir ini, izinnya pasir tetapi kalau kita cegat itu pulau-pulau itu diambil. *Nah* satu sisi kita bicara *climate change*, satu sisi kita bicara tentang *global warming* maupun naiknya ketinggian air laut. *Nah* ini akan mempercepat juga menenggelamkan Indonesia ini. Ini saya pikir lewat forum yang terhormat ini Pak Menteri harus ikut *cawe-cawe* ini dalam hal ini.

Kami akan berikan support dukungan itu, supaya pengawasannya aturannya tapi banyak kita dengarkan di suara-suara masyarakat, tokoh-tokoh begitu yang tadinya juga didalam pemerintahan menyampaikan begitu



bahayanya ini. Ini belum nanti dinamika masyarakat sekitar misalnya akan terjadi rebutan juga ya bahwa dia punya hak juga dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya pasti apa, gaduh, tambah panas begitu apalagi menjelang tahun politik yang sudah mulai agak menghangat begitu.

Jadi hal-hal ini perlu dipertimbangkan bahkan saya mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Presiden sebelumnya, kita menolak begitu. Begitu kurang lebih Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Sartono.

Iya silakan.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Terima kasih Pimpinan.

Singkat saja tadi diminta sama Pimpinan.

Pak Menteri yang kami hormati dan seluruh jajarannya.

Saya mungkin topiknya agak beda ya judulnya *illegal mining*, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas salah satu yang cukup tren, cukup besar ya permasalahan khususnya di Kalimantan Tengah. Ini adalah PT AKT Asmin Kolindo Tuhuk yang beberapa waktu yang lalu sudah kita bincangkan, kita bahas tapi sampai sekarang saya belum tahu progresnya apakah ini sudah melalui lelang karena kalau itu belum berarti *illegal mining* ini terus berlangsung atau berlanjut sampai saat ini.

Banyak sekali sebenarnya *illegal-illegal mining* yang terjadi saat ini di Republik ini ya, kayaknya negara itu tidak mampu atau tidak kuat menghadapinya. Maka oleh karena itu saya berharap kepada pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM untuk memperhatikan hal ini karena ini ancaman terbesar nantinya untuk kita ya, tidak hanya pemanasan global tetapi juga kerusakan-kerusakan lingkungan dan kerugian-kerugian negara.

Maka oleh karena itu saya ingin sekali agar pertama progress PT AKP yang ada di Kalimantan Tengah karena beberapa hari yang lalu saya sudah mendapat laporan juga dan pertanyaan, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan



dan termasuk demo dari masyarakat yang ada di sana dan juga ada surat masuk ke Komisi VII.

Ini untuk menjadi perhatian dari pemerintah, bagaimana sebenarnya status dari AKP sampai dengan saat ini. Maka untuk itu ini menjadi perhatian dan saya juga minta nanti karena Panja Ilegal Mining ini juga *kan* masih *on* supaya nanti panja bisa kembali memanggil menteri ya meminta penjelasan secara khusus untuk Asmin Kualindo Tuhuk yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Mungkin itu dari saya, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih banyak.

Silakan Pak Mukhtarudin.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati,
Pak Menteri.

Tadi sudah kita memutuskan menyepakati tentang *lifting* dan lain-lain, saya tidak bicara lagi tentang angka-angkanya tapi saya akan beri catatan-catatan terkait dengan *lifting* kita. Yang pertama, sejak dicanangkan 2019 1 juta barel per hari berarti sudah berjalan 4 tahun dan memasuki tahun ke-5 *lifting* kita turun terus. Turun terus dan terakhir hari ini kita putuskan turun lagi tahun 2023.

Yang kedua, tadi Pak Menteri juga menjelaskan tentang bahwa walaupun sekarang sudah ada eksplorasi, kegiatan di hulu dan segala macam tapi ini baru bisa kita peroleh secara maksimal 8-9 tahun ke depan. Artinya target 1 juta barel ini merupakan angka yang sangat *impossible* kita capai dalam waktu kurang lebih 5 tahun ke depan. Tetapi pemerintah sampai hari ini masih *firm*, tidak melakukan revisi ataupun evaluasi terhadap target 1 juta barel ini.

Saya menyarankan kepada pemerintah agar segera, kalau memang dalam 5 tahun ke depan tidak mencapai 1 juta barel, bahkan jauh di bawah target segera lakukan evaluasi, segera lakukan revisi karena kenapa? Karena ini menyangkut daripada rencana pemerintah neraca, neraca, neraca migas pemerintah, rencana ekspor dan impor, inikan mempengaruhi, juga



mempengaruhi rencana jangka panjang nasional kita. Termasuk juga *forecast* tentang PNB, ini dampaknya ya mungkin tidak pemerintahan hari ini tapi ini *kan* berdampak pada yang akan datang.

Nah oleh karena itu saya berharap ya apakah ada forum khusus nanti kita berbicara dengan Pak Menteri, pemerintah untuk merasionalkan target 1 juta barel ini, apakah kita review ke angka berapa karena saya sangat tidak yakin kalau 1 juta barel dengan ekspansi Pertamina, baik yang di luar negeri untuk mencapai 1 juta barel dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Sementara *lifting* kita setiap tahun kita turunkan terus, termasuk juga gas yang 12.000, agak pesimis saya untuk mencapai 12.000 pada 2030. Itu yang pertama.

Yang kedua, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan mengapa lemahnya di sisi bisnis hulu kita ini. Yang pertama, tentu tidak melihat pemain *big player-big player* K3S ini *kan* satu-persatu hengkang tidak tertarik untuk investasi. Yang pertama, soal *country risk* kita, regulasi kita yang masih tumpang tindih, yang belum kondusif bagi investasi. Ini mungkin kita bersama antara pemerintah dan DPR nanti dengan hulu migas menjadi bahasan kita juga yang akan kita perdalam terkait masalah regulasi tentang sektor hulu.

Yang kedua, tentu ini tanggung jawab daripada SKK Migas bagaimana reformasi *fiscal term* kita. *Fiscal term* kita juga tidak menarik untuk investasi di sektor hulu. Meskipun sudah ada upaya pemerintah untuk SKK Migas tentunya untuk melakukan reformasi di bidang regulasi, aturan tentang kontrak segala macam di sektor hulu. Saya juga ingin tahu progresnya apa langkah-langkah SKK Migas dalam rangka untuk memperbaiki *fiscal term* ini.

Dan yang ketiga adalah soal data seismik, yang kita tawarkan kepada investor kan data geologi, data masih data umum. Data seismik yang tidak kita tawarkan, sementara kita sekarang pemerintah tidak melakukan seismik.

Alangkah baiknya juga melalui APBN ataupun penugasan kepada Pertamina, atau seperti apa untuk melakukan data seismik. Sehingga data yang kita jual kepada investor ini data yang sudah data, yang sudah setengah jadi atau 3/4 jadi *lah*. Jadi kalau dibor itu kemungkinan besarnya dapat, jadi bukan *gambling*.

Nah kalau 3 hal ini diperbaiki, *country risk* tadi diperbaiki, *fiscal term* kita perbaiki, data yang kita tawarkan adalah data seismik, saya yakin bisnis hulu kita akan menggeliat lagi. Kalau hulu kita menggeliat lagi saya yakin *lifting* juga akan naik.

Saya kira itu catatan saya Pak Pimpinan, terima kasih.



KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, terima kasih banyak Pak Mukhtarudin.

Saya pikir, masih ada lagi? Tapi 1 menit aja ya *nggak* usah lama-lama ya.

Silakan Pak Hendrik, setelah Pak Hendrik baru terakhir Pak Nasir.

F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.):

Yang terhormat teman-teman Komisi, Pimpinan dan juga Pak Menteri beserta jajaran.

Pointer aja Pak Menteri terkait dengan pengawasan Pak Menteri, pengawasan migas subsidi. *Nah* akhir-akhir ini kita melihat bahwa Pertamina melakukan pengawasan tepat sasaran *gitu*, baik itu rencananya ke BBM maupun gas. *Nah* saya mempertanyakan, apakah langkah-langkah yang dilakukan Pertamina ini memang disetujui oleh Kementerian *gitu loh*, apa memang ini inisiatif dari Pertamina aja.

Kalau memang benar mereka melakukan pengawasan membuat aplikasi, berarti ada amanah yang diberikan kepada mereka untuk pengawasan. *Nah* pertanyaan saya dari Dirjen Migas maupun BPH apa strateginya *gitu*, apakah diberikan aja ke Pertamina atau bagaimana ini langkah-langkahnya. Ini juga perlu kita tahu.

Kalau memang itu ada amanah yang diberikan kementerian kepada Pertamina, sebaiknya logo dari kementerian atau Dirjen Migas harus ada di situ *gitu* atau BPH *gitu loh*, bahwa memang pengawasan yang dilakukan oleh Pertamina itu memang disetujui oleh kementerian *gitu*, dirjen ataupun Kepala BPH.

Itu penting Pak karena masyarakat juga nanya, Pak ini yang dilakukan oleh Pertamina memang disetujui oleh pemerintah atau bagaimana ini, kenapa tidak adanya lambang-lambang pemerintah di situ, terkait dengan sistem yang mereka lakukan.

Nah saya kira ini perlu dikaji Pak Menteri supaya masyarakat juga, ini memang Pertamina punya inisiasi atau memang sudah disetujui oleh pemerintah sendiri *gitu loh* karena kalau kita lihat saya *nggak tahu* apakah memang wewenang dari Pertamina melakukan juga pengawasan *gitu loh* atau cuman sebagai operator.

Nah ini kita perlu tahu Pak Menteri, itu yang penting supaya tepat sasaran ini berjalan baik dan masyarakat akhirnya tidak membingungkan, apakah memang uji coba-uji coba yang dilakukan Pertamina ini betul-betul memang diharapkan ke depan seperti itu kira-kira *gitu loh*, kita mau tahu.



Nah berikutnya terakhir Pak Menteri, kita juga pengen tahu juga K3S ini *kan* banyak Pak Menteri selalu ditampilkan sama kita 5 besar, kalau boleh sekali-sekali kita diberikan *lah* K3S seluruhnya yang beroperasi. Terus setiap tahun *kan* pasti ada *delay tuh*, ada yang angkat kaki segala macam, ini *kan* kita ingin tahu juga berapa persen K3S tahun ini yang angkat kaki atau berhenti, atau bagaimana supaya kita tahu bahwa betul-betul *lifting* yang kita harapkan itu bisa tercapai.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Hendrik.

Terkait yang terakhir itu saya pikir itu tergantung kita aja nanti, kalau kita mau agendakan di rapat panggil 1.000 perusahaan K3S pun *nggak* masalah nanti, ataupun kita minta laporan keuangan yang udah ini. Jadi saya pikir itu nanti biar agenda di kita aja yang kita inginkan.

Terima kasih banyak Pak Hendrik.

Selanjutnya Abang terakhir ditutup oleh Pak Nasir ya.

F-PDIP (H. ANDI RIDWAN WITTIRI, S.H.) :

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatllahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh kerabat Anggota Komisi VII,
Yang saya hormati Pak Menteri bersama jajarannya.

Langsung aja Pak Menteri, jadi gini saya barusan dapat kiriman foto-foto tentang kejadian sekarang di Mandiodo, Blok Mandiodo PT Antam. Kebetulan pada tahun lalu saya bersama teman-teman Anggota Komisi VII berkunjung ke sana menghadapi masalah ini, yaitu antara PT Antam dengan masyarakat.

Yang berkunjung waktu itu saya sama Pak Sugeng, sama Pak dari Demokrat juga Pak Rusdah dan Pak Adian. Bertemu langsung masyarakat dan yang kami putuskan waktu bertemu dengan masyarakat saat itu adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal atau masyarakat setempat untuk bekerja. Tapi sampai saat ini Pak, jangankan memberikan kepada masyarakat setempat Pusda Konawe Utara sampai sekarang juga ini belum diberikan kesempatan untuk bekerja, padahal hasil rapat kami waktu itu bersama pemerintah daerah setempat bersama Komisi VII dan PT Antam, yaitu mendiskusikan dan sesegera mungkin memberikan lahan kepada PT Pusda untuk bekerja sebagai kontraktor, *nah* sampai saat ini belum terealisasi Pak.



Mohon maaf sebelumnya kebetulan saya adalah satu-satunya Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan se-Sulawesi Pak, sehingga seluruh masalah yang muncul di Sulawesi biasanya langsung ke saya dulu Pak, baru saya lempar ke teman-teman yang lain.

Itu saja saya sampaikan karena sampai saat ini masyarakat di sana masih menuntut supaya bisa bekerja di lahan PT Antam seperti juga perusahaan-perusahaan lainnya. Itu saja sampaikan.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatilahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, betul bagus itu Pak diangkat oleh beliau itu.

Jadi saya pikir nanti kita perlu agendakan khusus aja Bang, khusus mengenai isu Mandiodo ini biar tuntas. Jadi dalam beberapa hal juga kita pimpinan dengan rekan-rekan juga sudah banyak melakukan advokasi. Cuma saya pikir isu ini perlu menjadi pantauan serius dari Komisi VII dan Kementerian ESDM.

Yang terakhir silakan hidangan penutup Bro Nasir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Terima kasih Pimpinan Komisi VII.

Teman-teman Anggota Komisi VII, Saudara Menteri.

Untuk menindaklanjuti masalah pasir laut tadi Pak Menteri, kalau bisa jangan dirusak lagi bumi ini apalagi di akhir masa masa jabatan Pak Menteri ini buat baik-baik aja *lah*, supaya bagus karena kalau sempet ini jadi masalah dan ada semacam seperti yang disampaikan teman-teman saya tadi dari Perhubungan, dari KKP, dari ESDM, satu lagi dari Pariwisata.

Nah menurut saya laut ini perlu dikelola dengan baik, bukan mengambil keuntungan buat memperkaya negeri lain, untuk memperluas negeri lain. Jadi saran saya gini Pimpinan, bagus kita buat panja saja untuk mendalami proses izin-izin ini, supaya lebih terang dan lebih jelas prosesnya. Dan kalau *nggak* cukup panja ya bagus di-pansus-kan. Jadi gabung dengan seluruh Komisi untuk mencari kesimpulan dan permasalahannya seperti apa, *nah* saran saya itu.

Jadi kalau satu lagi masalah Vale, ya kita minta pemerintah juga harus mengutamakan kepentingan pemerintah dan bukan mementingkan



kepentingan perusahaan dan kalau 51% kita lakukan Freeport ya harus sama dengan Vale, itu amanat undang-undang dan sebenarnya Freeport pun berat waktu itu kita menyetujuinya karena namanya izin udah selesai harusnya balik seperti Inalum. Inalum itu dikembalikan 100% kepada negara, tapi *bim salabim*-nya banyak kali waktu itu kita bingung juga. Jadi barang ini bisa jadi 51% juga Pak Maman, sampai papa minta saham di situ terjadi juga jadinya.

Terus tadi pengawasan terakhir Pak, ini sangat berkepentingan dengan masyarakat. Ini ribut terus di dapil dan seluruh dapil-dapil teman-teman masalah subsidi BBM ini. Saya harap Pak Menteri, Pak Dirjen turun ke lapangan, lihat langsung Pak.

Jadi *nggak* semua yang Bapak lihat di Jakarta sama dengan di daerah, ada yang tempuh untuk pom bensin itu 3 jam, ngantrinya 2 jam, 3 jam, *nah* kenapa *nggak* ada kebijakan penugasan BBM SPBU ini juga bisa dibuka di pedalaman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. *Nah* kadang-kadang masyarakat ngambil pakai jerigennya ditangkap polisi, *nah* tapi kebijakan pemerintahnya *nggak* lahir-lahir, *nah* tambah lagi penimbunan yang dilakukan oleh pemain-pemain BBM ini.

Saya minta tadi saya merumuskan aja lebih dalam dari kalimat teman saya tadi, ada Satgas lah Pak, yang Bapak bilang Satgas itu mana, orangnya dimana, hasilnya apa. Kalau BPH Migas ini saya anggap udah mati aja, *nggak* pernah ada hasilnya *gitu loh*, makan gaji buta menurut saya. *Nah* saya cuman minta penugasan aja sekarang, yang Bapak tunjuk Pertamina ini gimana *sih* regulasi yang mereka lakukan, bener *nggak*.

Masa saya sama teman-teman ini menemukan, bisa menemukan Pak Menteri, masa yang di sini yang sebagai penanggung jawab penugasan atau regulator tidak berhasil, *nggak* tahu *lah* apa namanya tapi ini aliran uangnya besar sekali Pak Menteri setiap hari dan gampang rekeningnya ini bisa di-*detect gitu loh*, pakai *barcode lah*, tapi *barcode* ini mobil ini bisa 10 kali muter di seluruh pom bensin, *nggak* jelas juga ini programnya menurut saya.

Jadi menurut saya tingkat kejerahannya seperti apa yang harus dilakukan, bisa nenteng petugas, *kan* bisa langsung cabut izinnya berhentikan. *Nah* kalau satu aja Pak, satu SPBU Bapak cabut izinnya itu seluruh SPBU tertib itu, apalagi 10 Pak bagus sekali. *Nah* jadi jangan, kita ini pusing hadapi masalah ini, di lapangan ini *nggak* ada solusinya *gitu*, yang megang wewenangnyanya orang Bapak *gitu*.

Sebenarnya tinggal mutus aja, selesai, tidak dikirim BBM-nya ke SPBU itu, udah selesai, cabut izinnya selesai. *Nah* ini bisa dilakukan *gitu loh*, kenapa *nggak* dilakukan sampai hari ini. Kita kasih subsidi, tapi subsidi ini *nggak* diterima Pak oleh masyarakat, cuman dikasih 200.000 beli, cuman 200.000 beli, *nggak* tahu dia masih ada nyimpen 2 KL, 1 KL setiap hari dijaga oleh aparat, *kan* bingung kita jadinya yang *gini-gini*.



Saya minta Pak Dirjen turun *dong* ke lapangan, mana timnya, mana direktornya, mana satuan kerjanya *gitu*. Jadi Bapak boleh publikasikan di sini, kalau BPH ini udah *nggak* saya anggap Pak, pusing kita, *nggak* ada petugasnya di lapangan tapi dibayar sama negara, percuma *nah gitu*. Jadi saya menugaskan di sini pengawasannya Pak, pengawasan dalam sistem regulasi subsidi ini.

Ini benar-benar kita minta diterima oleh rakyat, diterima masyarakat. *Nah* kebijakannya satu lagi saya minta, mohon maaf mungkin saya bilang dapil saya. dapil saya itu perkebunan seluruhnya, dari pom bensin itu ke desa itu mungkin 2 jam, 3 jam, mungkin punya kebijakan pemerintah harus dibangun SPBU didalam sana *gitu* Pak, jadi kita *clear*, *nah* mana *sih* database-nya Pertamina ini *gitu loh*. Saya minta jadi waktu mengeluarkan izin SPBU itu *clear*, zonasinya tercatat di situ, *oh* ini kebutuhannya di desa ini sekian, kecamatan ini jumlahnya sekian *gitu*.

Mungkin itu Pak, tapi yang paling penting tadi ya mohon tadi pasir laut itu dibicarakan lagi, supaya jangan sampai *blunder* Pak, kalau *nggak* ya dibuat Panja Pimpinan.

Itu aja Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahita'ala wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sip ya, terima kasih banyak.
Saya pikir langsung masuk kesimpulan aja, lanjut.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pimpinan interupsi, saya minta tanggapan dari Pak Menteri atas apa yang diberitakan ini.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, ya masuk dulu ke kesimpulan dulu ya, apa tanggapan dulu? Tanggapan aja dulu ya.

Silakan Pak Menteri, direspon Pak Menteri yang lain-lain itu Pak Menteri. Saya lihat itu ada 3 hal yang besar itu, Vale, Pasir Laut, Mandiodo, 3 itu ya sama apa? Iya artinya optimalisasi pengawasan di sektor hilir migas, saya pikir itu.

Silakan Pak Menteri.



MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI.

Terima kasih atas tambahan masukan dalam agenda lain-lain tadi, saya akan mencoba menjawab satu-persatu dan mungkin kelengkapannya kita lengkapi dengan jawaban tertulis.

Terkait dengan divestasi Vale yang 51% kita melihat semuanya sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ada praktis yang sudah berjalan dengan baik, yaitu antara lain yang ada di Freeport. *Nah* saat ini yang menjadi *point of concern* adalah Vale merasa sudah men-*divest* 40%, 20% ke Mind-ID dan kemudian 20% lagi waktu itu ditawarkan secara resmi kepada pemerintah, tapi pemerintah waktu itu tidak ada yang merespons, baik dari BUMN maupun *government* lainnya.

Jadi untuk pemerintah secara resmi menyurat bahwa ini bagusnya dipublik *kan* di dalam negeri, jadi 11% itu udah ada kesepakatan dari Vale sendiri dan juga kelebihan daripada itu nanti kita proses berdasarkan *business to business* basis, antara pihak-pihak terkait yang bersangkutan. Jadi itu yang mengenai Vale.

F-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Mohon izin Pak Menteri, tadi itu yang ditawarkan oleh PT Vale 11, yang dimiliki oleh Mind-ID 20, berarti 31 ya. Kami ada informasi yang 20% apakah Pak Menteri sudah cek, informasinya itu bukan dikuasai oleh pasar domestik, mereka pakai cangkang perusahaan domestik. Infonya itu yang memiliki saham 20% mereka-mereka juga, bahkan terindikasi itu dana pensiun PT Sumitomo, padahal PT Sumitomo sendiri sudah memiliki saham yang tercatat di PT Vale.

Jadi menurut kami ini palsu-palsu iya kan, yang 20% di publik ini 80% mereka juga dengan baju, baju publik. Jadi saya pikir kalau kita mau emang negara mau menguasai, mau melanjutkan *legacy* Presiden Jokowi seperti beliau lakukan terhadap PT Rokan dan beliau sering pidato itu dan kami bangga, di era kepemimpinan beliau Pak Jokowi bisa mengakuisisi 2 kepemilikan asing, PT Freeport dan PT Rokan.

Saya berharap Presiden Jokowi sebelum tanggal 20 Oktober mengakhiri jabatan 2024, mengakhiri jabatannya juga bisa menambahkan satu lagi, ini lho PT Vale salah satu cadangan nikel terbesar di dunia dikuasai oleh negara. Berarti beliau *lah* Presiden dan benar-benar mengimplementasikan Pasal 33 itu.



Harapan kami bahwa posisi 51, 20 plus 11 yang sedang ditawarkan kami koordinasi temen-temen Komisi VI. Mereka bilang ada *nggak* uangnya, kita siap minta penyertaan modal negara *kan*. Tapi apakah Kementerian ESDM yang menjadi mitra Komisi VII senada, di Komisi VI sudah disuarakan Pak, bahwa Komisi VI mendukung pemerintah dalam hal ini BUMN menguasai saham Vale seperti Freeport.

Jadi kami kaget juga ketika dibilang *oh* itu 20 plus 20, plus 11 51, tapi 20-nya ini palsu, ya *kan*? Karena 20-nya ini terindikasi di pasar modal ini Sumitomo. Bahkan ini ada informasi ya kita akan ricek kembali ya, ini dana pensiun Sumitomo yang menguasai dia. Berarti kita kasihan *dong* presiden dibohongin *kan*, dengan mereka mengemas bahwa 51.

Nah kalau kita memang kepengen kemandirian ini, kita ambil, kita dukung Presiden Jokowi *kan*, mengambil, menguasai apalagi beliau selalu bilang "kita memiliki sumber daya alam cadangan terbesar di dunia, nikel". Masa nikel kita, kita kasih ke asing Pak dan sini dicatatkan tadi apa kata Pak Nasril, dicatatkan di bursa Kanada sana.

Kita sedih dengan kondisi ini, kenapa giliran Freeport presiden begitu berani *kan* dan kita hebat beliau, Rokan. Setiap pidatonya beliau selalu sebut *loh* Pak Jokowi, kami sudah berhasil mengakuisisi Freeport, kami berhasil mengakuisisi PT Rokan, kenapa giliran Vale kita melempem, padahal ini nikel. Nikel yang menjadi idola sekarang, unggulan Republik, kenapa kita *nggak* ngikutin semangat presiden.

Saya berharap di forum ini presiden mendengar bahwa ini saatnya pemerintah Republik Indonesia di era pemerintahan Presiden Jokowi harus ambil alih, harus kuasai saham Vale menjadi saham republik. Jadi saya pikir, saya pikir Pak Menteri juga harus mengikuti *lah* keinginan presiden dan saya meyakini bahwa semangat presiden, semangat untuk penguasaan saham apa, sumber daya alam Indonesia itu selalu ada di hati beliau, saya yakin itu.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pimpinan, saran Pimpinan.

Apa yang Pimpinan sampaikan terakhir tadi kita masukkan dalam suatu kesimpulan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak Menteri, lanjut Pak Menteri.
Saya pikir cukup ya biar kita lanjut *nih*, cukup ya.

Silakan Pak Menteri respon aja.



MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Jadi mengenai Vale menurut kami, kita respon demikian. Mengenai kepemilikan yang di publik itu kepemilikannya asing, tentu saja ini harus kita cek ke OJK ya dan bagaimana prosedur sebetulnya mengenai bursa di Indonesia aturannya bagaimana menurut OJK. Jadi kita memang harus juga menjaga *governance* yang, yang apa memang berlaku.

F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Sepakat ya Pak Menteri, Pak Menteri sebelum karena informasinya Pak Menteri sudah menandatangani proses perpanjangan. Padahal kami sebelumnya Komisi VII ini *nggak* tahu ya kita klarifikasi Pak Menteri, infonya ya, info yang kami dengar bahwa Menteri ESDM sudah menandatangani perpanjangan PT Vale, masa kita *nggak* kasihan 3 gubernur menyatakan keprihatinannya.

Presiden juga beliau sangat antusias penguasaan saham negara dan Komisi VI. Kami kapan hari diskusi dengan Komisi VI, mereka bilang bahwa Komisi VI mendukung. Bahkan Komisi VI siap meminta kepada Menteri Keuangan untuk penyertaan modal negara kalau memang diperlukan untuk pengambilalihan Vale.

Jadi saya pikir kita semua di DPR kita semangatnya sama Pak, kita ingin menguasai Vale ini sebagai kepemilikan negara murni dan tadi sebagai catatan Pak Menteri juga menyampaikan akan di *cek* ke OJK. Kami bersyukur kalau itu dilakukan, tapi mohon juga jangan dilanjutin dulu *lah* perpanjangan, cek dulu, jangan sampai kita ketipu, ternyata mereka-mereka juga yang 20% karena informasi yang kami dapat ini harus dicek, kalau Pak Menteri belum cek, tiba-tiba Pak Menteri tanda tangani itu aneh *kan* karena kami mendapat informasi dari 20% saham publik yang dimiliki Vale itu mereka, cuma berkedok atau mengemasnya pakai cangkang di republik ini.

Jadi kita harap Pak Menteri, sebelum isu bahwa proses perpanjangan itu sudah ditandatangani, kami jujur aja, kami tidak akan sepakat. Kami akan melakukan bahwa itu belum pernah ada persetujuan dari DPR *gitu*.

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Selanjutnya silakan Pak Menteri, pesannya sudah nangkap sekali.

Silakan Pak selanjutnya.



MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Selanjutnya mengenai.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Saya pikir gini ya terkait isu yang Vale, isu yang lain-lain itu kita agendakan lagi aja khusus jadi biar elaborasinya lebih enak *gitu* karena ini kan agendanya masalah asumsi makro ini.

Silakan.

ANGGOTA:

Paling nanti, Pimpinan, paling dicantolin nanti di catatan rapat kita terkait dengan masalah ini kita agendakan khusus.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, jadi mengenai *tailing* nanti akan kami cek mengenai kesehatan lingkungan di kelautan di daerah *mining* di Pulau Obi.

Kemudian mengenai Blok Masela *inshaa* Allah akhir bulan ini akan kita selesaikan perjanjian jual alih sahamnya, sudah ada titik temu. Jadi nanti memang Pertamina Konsorsium yang akan *take over*.

Nah kemudian juga mengenai hasil sedimen, memang ini adalah bermuara pada pendalaman alur laut yang mendangkal disebabkan oleh sedimentasi karena sudah berproses sekian tahun. Itu diinisiasi dari dan akibat dari sedimentasi ini juga berdasarkan studi yang dikeluarkan, itu adalah studi dari KKP itu juga memberikan dampak terhadap biota sekitar.

Dan alur laut ini tentu saja juga domain daripada pelayaran dari kapal laut, pelabuhan. Posisi ESDM selalu mengikuti aturan bahwa sedimen itu, ya pertama harus tidak mempunyai kandungan mineral dan harus dilakukan analisa oleh laboratorium. Demikian juga mengenai kesehatan laut itu nanti domainnya daripada LHK.

Mengenai izin pengelolaan karena pasir nonmineral itu adalah berada di daerah, itu yang memang menjadi domainnya daerah. Jadi ini yang menjadi mekanisme, untuk mekanisme apa yang diinisiasi untuk pendalaman laut untuk bisa mengurangi sedimen akibat daripada pendangkalan.

Mungkin itu aja Pak Ketua, mohon maaf.



ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Izin menanggapi Pimpinan, boleh?

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Begini aja saya pikir kalau saya ini sebetulnya lebih setuju pasir laut ini kita panjang, kita panjangin, tapi mohon maaf *gini* aja. Saya juga nanti mau mengusulkan dalam kesimpulan *nggak* perlu ada dua-duanya ini dulu karena tema ini adalah masalah asumsi makro. Jadi maksud saya kita *close* aja dulu karena waktu juga, *nggak* apa-apa Pak Bambang *gitu* aja. Jaid nanti kita setuju bahwa rapat ini akan kita agendakan lagi masalah Vale, masalah pasir, masalah Mandiodo.

Itu aja cukup ya.

F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Atau gini Pak Menteri, mungkin usul Pimpinan.

Kita *kan* minggu depan ada rapat kerja, sebelum rapat kerja terkait penetapan pagu indikatif Kementerian ESDM kita rapat kerja dulu terkait 3 isu besar ini kan, khususnya tadi soal divestasi karena mereka ini sudah berproses dan untuk diketahui bahwa PP yang jadi landasan ini PP yang dibuat menjelang berakhirnya pemerintahan Pak SBY beberapa hari sebelumnya, kalau *nggak* salah di bulan-bulan Oktober Pak Menteri ya PP-nya.

Jadi saya pikir untuk PT Vale kita khususkan di raker minggu depan, kita khusus membahas PT Vale, tbk. Sebenarnya kita di panja, kami sudah mintakan audit Pak, ke BPK. *Kan*, kami, Pak Ketua Komisi sudah sampaikan ke Pimpinan DPR, kami menunggu hasil dari BPK terkait sebelum proses divestasi ini jalan, jangan sampai ini terjadi divestasi merugikan negara.

Kami juga pernah berkunjung rapat konsultasi dengan BPK RI, kami diterima oleh beberapa Anggota BPK, AKM IV, AKM I dan juga AKM yang membidangi BUMN, AKM VII. Mereka menyarankan jangan dulu divestasi, kami akan teliti dari semua aspek, dari aspek lingkungan, dari aspek BUMN-nya, bahkan juga Pak Nyoman AKM I menyampaikan kami juga akan bantu, kebetulan beliau paham. Kami juga akan koordinasi dengan HPH.

Jadi saya pikir khusus untuk PT Vale kita di minggu depan.



**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Jangan di rakernya Pak, raker itukan masalah anggaran. Kita agendakan aja khusus mengenai Vale, satu.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak, usulnya Pak Ketua pas, saya usulkan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Sebentar Pak Ramson dulu, kita bahas khusus sehusus-khususnya terkait Vale. Kita bahas sehusus-khususnya terkait penghianatan terhadap perampokan negara, pasir laut. Kita bahas sehusus-khususnya terkait isu rakyat Mandiodo tapi saya mohon kepada teman-teman jangan kita campur adukkan agenda pembahasan anggaran kita dengan itu.

Nggak apa-apa ya, kita setuju ya, 3 agenda itu.

F-G ERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Saya usulkan.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Bagaimana Bang Ramson, *oh* iya plus blok Masela.

F- GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Tanggal 7 Juni Rabu kita hanya RDP dengan Kepala BIG dan Bapeten, di situ banyak lowong waktu kita. Di situlah kita tentukan raker dengan menteri soal 2 terkait itu.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Begini saya mau mempersingkat waktu rapat saja, jangan ajarkan buaya berenang. Sekretariat segera agendakan, *nggak* usah lagi bahas di sini tapi di luar agenda raker anggaran ya, saya minta itu aja.

Terima kasih, saya pikir cukup ya, masuk ke kesimpulan sekarang.

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI, Senin 5 Juni 2023.



1. Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Saya pikir angkanya udah sama ya, ketok ya, masuk.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Dengan catatan Komisi VII DPR RI akan melakukan pendalaman dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Dirut PT Pertamina terkait proyeksi kuota dan realisasi LPG 3 kilo.

2. Komisi VII DPR RI memahami penjelasan Menteri ESDM terkait pagu indikatif Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2024 sebesar 6,7 triliun blablabla dan akan mendalami dengan seluruh Eselon 1 Kementerian ESDM.

Setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Gimana Pak Menteri?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Poin 3 mengenai pagu mungkin tadi dalam RKAKL, dalam pendalamannya.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Tambahannya ya.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Pagu yang diusulkan oleh Kementerian ESDM terkait itu ada di dalam RKAKL untuk dibahas di.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oh pagu indikatif Kementerian ESDM RI yang ada di dalam RKAKL.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

2024.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke setuju, setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Yang terakhir saya pertegas lagi kepada sekretariat dan semua media di Republik Indonesia ini, Komisi VII akan mengagendakan 3 agenda besar yang katanya *kan* begitu, baik yang nyata maupun yang gaib.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pimpinan, Pimpinan, ada satu *nih* Pimpinan.
Tadi, pertanyaan saya tadi *kok* belum, belum digubris *gitu loh*.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Begini, ini yang sebetulnya memang maksud saya *nggak* apa-apa kita agendakan saja khusus Pak karena kalau kita buka lagi di sini nanti panjang lagi. Bapak mengenai AKT *kan*, Tuhuk itu, iya *nggak* apa-apa nanti kita buka aja nanti agenda itu terkait gabungan aja nanti Mandiodo *kan* isunya sama itu *gitu*, cocok ya. Iya jadi segera diagendakan.

Jadi saya minta sama Pak Menteri terkait 3 agenda itu mohon dipersiapkan penjelasannya karena ini memang 3 isu besar, Vale, yang kedua pasir laut, yang ketiga adalah isu Mandiodo dan terkait *illegal mining*.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Kalau tanggalnya belum Pimpinan? Tanggal agendanya belum.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Masalah tanggal saya pikir nanti kita serahkan ke sekretariat yang lebih paham ya.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatillahi wabarakatuh.

Raker Asumsi Makro kita tutup.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pak Ketua, *closing*.



**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Pak Ramson, ini *closing statement* dari Pak Menteri, panjang kali tadi saya, habis ini kita masih ada agenda lagi ya? Mohon maaf bisa *nggak* kita *re-schedule* aja, digabungin aja besok aja, cocok ini pagu indikatif. Yang selanjutnya nanti yang kesekjenan itu kita gabungin besok aja Pak.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI.

Kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya agenda hari ini, kami telah memperhatikan seluruh masukan dari Ibu-Bapak sekalian yang dahsyat hari ini dan juga gelombang selanjutnya akan kita siapkan dengan baik.

Kami harap pembahasan selanjutnya terkait dengan RKAKL tahun 2024 nanti dengan para Eselon 1 dapat memberikan hasil yang terbaik untuk anggaran Kementerian ESDM di tahun 2024 tersebut.

Demikian *closing pointer* dari kami, atas dukungan, partisipasi dan doa semangatnya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih banyak Pak Menteri.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.45 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dra. Nanik Herry Murti
NIP. 196505061994032002

